

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN DI KABUPATEN PINRANG

Skripsi
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
untuk mencapai derajat Sarjana S-1

Program Studi Ilmu Pemerintahan



Oleh:

RADINAL MUCHTAR

E 121 11 902

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2017

**LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI**

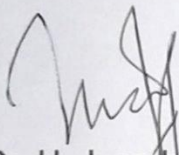
**PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN ORGANISASI
KEPEMUDAAN DI KABUPATEN PINRANG**

Disusun dan diajukan oleh:
Radinal Muchtar
E12111902

Telah dipertahankan di depan panitia ujian skripsi
Pada tanggal 24 November 2017
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

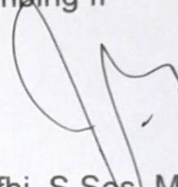
Menyetujui:

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Juanda Nawawi, M.Si
Nip. 195708181984031002

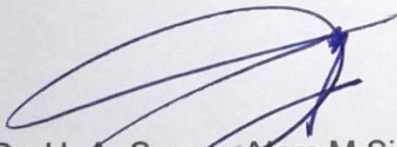
Pembimbing II



A. Murfhi, S.Sos, M.Si.
Nip. 197203282900121001

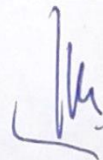
Mengetahui:

Ketua Departement Ilmu Politik
Dan Pemerintahan FISIP Unhas



Dr. H. A. Samsu Alam M.Si
Nip. 19641231 198903 1 027

Ketua Program Studi Ilmu
Pemerintahan FISIP Unhas



Dr. Hj. Nurlina, M.Si
Nip. 19630921 198202 2 001

**LEMBAR PENERIMAAN
SKRIPSI**

**PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN ORGANISASI
KEPEMUDAAN DI KABUPATEN PINRANG**

Disusun dan diajukan oleh:

**Radinal Muchtar
E12111902**

Telah Diperbaiki

Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Oleh Panitia Ujian Skripsi

Pada Program studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, Pada hari jumat, 24 November 2017

Menyetujui:

PANITIA UJIAN

Ketua	: Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si
Sekretaris	: A. Murfhi, S.Sos. M.Si
Anggota	: Dr. Nurlinah, M.Si
Anggota	: Dr. H. Suhardiman Samsu, S.Sos, M.Si
Anggota	: Rahmatullah, S.IP, M.Si
Pembimbing I	: Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si
Pembimbing II	: A. Murfhi, S.Sos. M.Si

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kehadiran Allah Swt. Atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya baik berupa kesehatan maupun kesempatan serta ridhanya, sehingga skripsi yang berjudul “ **Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Pinrang** ” ini, dapat penulis selesaikan.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Jurusan Politik Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penulis sangatlah menyadari bahwa didalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi teknik penulisan maupun dari isinya. Untuk itu, penulis menerima segala bentuk usul, saran ataupun kritikan yang sifatnya membangun demi penyempurnaan berikutnya.

Oleh karena itu izinkanlah penulis pada kesempatan ini mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Seluruh civitas akademika Universitas Hasanuddin. Ibu Rektor Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA. dan jajarannya, Dekan FISIP Unhas Prof. Dr. Andi Alimuddin Unde, M.Si dan jajaran, Ketua jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan Dr. A. Samsu Alam, S.Ip, M.Si, Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Dr. Nurlina, M.Si. dan seluruh mahasiswa Unhas tanpa terkecuali.
2. Prof. Dr. H. Juanda Nawawi, M.Si selaku pembimbing I penulis dan A. Murfhi, S.Sos. M.Si selaku pembimbing II penulis yang telah banyak memberikan arahan masukan dan membimbing penulis sampai sejauh ini.
3. Bapak Bupati Pinrang dan segenap pemerintah Kabupaten Pinrang terima kasih atas segala bantuan yang diberikan selama penelitian
4. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, serta seluruh stafnya yang telah memberi bantuan kepada penulis selama penulisan skripsinya
5. Terimah Kasih untuk seluruh keluarga besar Himapem Fisip Unhas dan seluruh Keluarga Mahasiswa Fisip Unhas, KMP Unhas, keluarga besar Utmuh, Teman-teman KKN Gel. 90, yang telah menjadi keluarga bagi penulis selama menyandang gelar mahasiswa. Dan terimah kasih untuk

seluruh organisasi yang pernah menjadi tempat bagi penulis untuk menempa diri.

6. Terkhusus buat saudara-saudaraku di **Enlightment'011** dan **Cebelas'011** Terima kasih untuk masa-masa galau dan ceria yang pernah kita lalui bersama
7. Terima kasih buat orang-orang yang telah banyak membantu maupun menemani penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. Saudara-saudaraku Arifin, Sam, hendri, paddul, arman, ari, arga, ipul, dan *special thanks to* saudara Haryono karna selalu menemani penulis di dalam kampus untuk mengurus berkas, Pak Mursalim sang juru selamat bagi saya dan bagi seluruh mahasiswa politik pemerintahan.
8. Kedua orang tua tercinta Ayahanda **Muchtar Rulu** dan Ibunda **Ratna** atas segala kasih sayangnnya selama ini serta dukungan dan doa tertulus dan terikhlas yang pernah saya dapatkan di dunia hingga penulis takkan bisa membalasnya. Maafkan Jika ananda sering menyusahkan serta melukai peraasaan Ibunda dan Ayahanda.
9. Terima kasih kepada ketiga kakak tercinta Mediswaty, Soedarno Muchtar dan Muh. Syarif Muchtar yang senang tiasa memberi semangat serta bantuan dana kepada penulis selama masa penelitian hingga ujian skripsi.

10. Kepada seluruh teman dan kerabat yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu namanya. Terima kasih atas segala bantuannya selama ini kepada penulis. Semoga Allah Swt, membalas segala bantuan yang diberikan dengan sesuatu yang lebih baik. *Aamiin.*

Akhirnya penulis berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua yang membutuhkan dan isi yang disajikan didalamnya dapat menambah khasanah pengetahuan Ilmu Pemerintahan khususnya. *Aamiin Yaa Rabbal Alamin.*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Makassar, September 2017

Radinal Muchtar

INTISARI

Radinal Muchtar, Nomor Induk **E121 11 902**, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Menyusun Skripsi dengan judul **"Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Di Kabupaten Pinrang"** Di bawah bimbingan Prof.Dr.H. Juanda Nawawi, M.Si, sebagai pembimbing I dan A. Murfhi, S.Sos. M.Si sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Di Kabupaten Pinrang dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan di kabupaten Pinrang. Teknik analisis secara kualitatif yaitu analisis data berdasarkan kata-kata yang disusun dalam bentuk teks yang diperluas. Data yang dianalisis adalah data dari situasi-situasi atau peristiwa yang terjadi di lapangan dan juga didukung dengan bantuan data primer yang berasal dari hasil wawancara, pertanyaan-pertanyaan, tanggapan-tanggapan dari para informan dan studi kepustakaan berdasarkan indikator-indikator yang ditentukan dalam penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam pemberdayaan organisasi kepemudaan di kabupaten Pinrang belum dapat dikatakan berhasil. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya program khusus yang dibuat serta pendanaan yang tidak jelas dari pemerintah daerah untuk memberdayakan organisasi kepemudaan yang ada. Ini merupakan tugas pemerintah daerah pada umumnya dan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga pada khususnya agar lebih memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan organisasi kepemudaan di Kabupaten Pinrang saat ini. Adapun faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan organisasi kepemudaan. Faktor pendukung yakni tingginya minat pemuda dalam berorganisasi serta semangat bekerja Dispaspor dalam memberdayakan organisasi kepemudaan. Sedangkan faktor penghambat yakni Dispaspor baru terbentuk selama setahun sehingga masih belum berpengalaman dalam menengahi masalah organisasi kepemudaan serta pendataan organisasi kepemudaan yang kurang jelas.

ABSTRACT

Radinal Muchtar, Registration Number **E121 11 902**, Government Studies Program, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University, Preparing Thesis entitled "**The Role of Local Government in Empowering Youth Organizations in Pinrang Regency**" Under the guidance of Prof.Dr.H. Juanda Nawawi, M.Si, as the supervisor of I and A.Murfhi, S.Sos. M.Si as supervisor II.

This study aims to identify and analyze the role of local government in empowering youth organizations in Pinrang district and what factors influence the empowerment of youth organizations in Pinrang district. Qualitative analysis technique is data analysis based on words arranged in the form of an expanded text. The data analyzed are data from situations or events occurring in the field and also supported with the assistance of primary data derived from interviews, questions, responses from informants and library studies based on the indicators specified in the study.

The results showed that the role of the Department of Youth and Sports Affairs in the empowerment of youth organizations in Pinrang district has not been successful. This can be seen from the absence of specific programs created as well as unclear funding from local governments to empower existing youth organizations. This is the duty of the local government in general and the Office of Youth and Sports Tourism in particular to pay more attention to what the needs of youth organizations in Pinrang Regency today. The supporting and inhibiting factors in empowering youth organization. Supporting factors are the high interest of youth in organizing and the spirit of work of Dispaspor in empowering youth organization. While the inhibiting factors that are new Dispaspor formed during the year so that still not experienced in mediating the problem of youth organization and data collection youth organization is less clear.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Lembar Penerimaan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Intisari.....	viii
Abstraksi.....	ix
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel.....	xiii
Daftar Gambar.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Peran.....	11
2.2 Konsep Pemerintah.....	14
2.3 Konsep Pemerintahan Daerah.....	16
2.4 Konsep Pemberdayaan.....	18
2.5 Konsep Pembinaan.....	21
2.6 Konsep Pengawasan Organisasi.....	28
2.7 Konsep Pemuda.....	34
2.8 Konsep Organisasi Kepemudaan.....	36
2.9 Konsep DISPASPOR.....	38

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian.....	41
3.2 Dasar dan Tipe Penelitian.....	41
3.3 Informan Penelitian.....	42
3.4 Teknis Pengumpulan Data.....	42
3.5 Sumber Data.....	43
3.6 Analisis Data.....	43
3.7 Definisi Operasional.....	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Kabupaten Pinrang.....	45
4.1.1 Letak Geografis Kabupaten Pinrang.....	45
4.1.2 Administratif.....	46
4.1.3 Topografi.....	48
4.1.4. Geologi.....	49
4.1.5. Hidrologi.....	51
4.1.6. Klimatologi.....	51
4.1.7. Kawasan Budidaya.....	53
4.1.8 Wilayah Rawan Bencana.....	59
4.1.9 Keadaan Penduduk.....	62
4.1.10 Visi dan Misi Kabupaten Pinrang.....	65
4.2. Profil Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga.....	66
4.2.1. Tugas Pokok Fungsi dan Struktur DISPASPOR.....	67
4.2.2. Visi dan Misi.....	69
4.2.3. Tupoksi Struktur DISPASPOR.....	71
4.3. Organisasi Kepemudaan Di Kabupaten Pinrang.....	78
4.3.1 Profil (KMP-UNHAS).....	79

4.4 Peran DISPASPOR.....	90
4.4.1 Pembinaan.....	91
4.4.2 Pendanaan.....	101
4.4.3 Pengawasan.....	105
4.5 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peran DISPASPOR Dalam Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Pinrang.....	108
4.5.1 Faktor Pendukung.....	108
4.5.1 Faktor Penghambat.....	111
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	101
5.2 Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA.....	121
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	123

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Luas Wilayah Perkecamatan di Kab. Pinrang	47
2. Banyaknya curah hujan di Kabupaten Pinrang	52
3. Arahkan Kawasan Peruntukan Lahan Basah dan Lahan Kering	55
4. Lokasi Rawan Abrasi dan Sedimentasi	61
5. Jumlah Penduduk Berdasarkan umur dan jenis kelamin	62
6. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Perkecamatan	64
7. Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	65
8. Daftar Susunan Nama-nama Ketua Umum KMP-Unhas Berdasarkan periode kepengurusan	81
9. Daftar Program Kerja tahunan KMP-Unhas	86
10. Jumlah Akumulasi Anggota Biasa KMP-Unhas	89
11. Data Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Pinrang	93
12. Program Bidang Kepemudaan DISPASPOR tahun 2017	96
13. RKA-SKPD 2017 Bidang Kepemudaan DISPASPOR	102

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Peta Wilayah Administratif Kabupaten Pinrang	46
2. Struktur Organisasi DISPASPOR Kab. Pinrang	69
3. Struktur Organisasi KMP-UNHAS	85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Generasi muda pada semua zaman dan tempat memegang peranan yang signifikan. Tak heran apabila kemudian generasi muda menjadi pilar dari kokohnya sebuah Negara. Dinamika yang ada memberikan gambaran bahwa generasi muda memberikan kontribusi yang besar terkait dengan perubahan dan proses pembangunan yang ada. Sejak era Pergerakan Nasional hingga Orde Reformasi, generasi muda menjadi motor penggerak perubahan, sekaligus memastikan bahwa proses perubahan tersebut sesuai dengan tuntutan jaman, dalam konteks pembaruan dan pembangunan bangsa.

Pembangunan di bidang kepemudaan merupakan mata rantai tak terpisahkan dari sasaran pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Keberhasilan pembangunan pemuda sebagai sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki keunggulan daya saing, merupakan salah satu kunci untuk membuka peluang untuk keberhasilan di berbagai sektor pembangunan lainnya. Oleh karena itu, pembangunan kepemudaan dianggap sebagai salah satu program yang tidak dapat diabaikan dalam menyiapkan kehidupan bangsa di masa depan.

Akan tetapi, harus disadari bahwa pada konteks tertentu generasi muda tidak dapat dibiarkan berjalan sendiri, namun membutuhkan stimulasi agar arah gerakannya dapat berjalan dengan baik. Sebab, harus diakui bahwa di satu sisi generasi muda memiliki semangat yang menggelora untuk melakukan berbagai aktifitas positif bagi kemajuan bangsa, namun di sisi lain terdapat berbagai godaan yang dapat mengendorkan dan membelokkan tujuan yang telah dirumuskan ke arah yang tidak baik. Oleh karena itu perlu ditingkatkan upaya pemberdayaan generasi muda secara terus menerus dalam kerangka pembangunan daerah maupun nasional.

Maka untuk itu, pemerintah diharapkan dapat memberikan wadah maupun sarana dan prasarana kepada generasi muda untuk mengembangkan diri, salah satu wadah yang tepat agar generasi muda dapat menyalurkan kreatifitas dan mengembangkan diri yang diharapkan dapat berguna bagi bangsa yakni melalui organisasi kepemudaan.

Organisasi didirikan sebagai suatu wadah untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan. Organisasi tersebut harus mengelolah berbagai dan rangkaian kegiatan yang diarahkan menuju tercapainya tujuan organisasi. Pelaksanaan rangkaian kegiatan dalam organisasi dilakukan oleh manusia (*humanbeing*) yang bertindak sebagai aktor atau peserta dalam organisasi yang bersangkutan, maka dengan sendirinya kinerja (*performance*) organisasi yang bersangkutan banyak tergantung pada perilaku manusia yang terdapat dalam organisasi tersebut.

Organisasi kepemudaan sendiri diartikan sebagai lembaga yang menghimpun segenap potensi anak muda baik mahasiswa maupun anak sekolah yang masuk kategori pemuda bahkan mereka yang tidak menjadi anak terdidik untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan. Organisasi kepemudaan harus diberikan kesempatan untuk berkembang dalam mewujudkan peran aktualnya, tetapi peran dan eksistensi generasi muda sangat tergantung pada independensi organisasi serta profesionalisme pengelolaan organisasi, untuk menuju pada organisasi yang otonom dan demokratis. Berangkat dari kesadaran akan pentingnya posisi, peranan dan potensi generasi muda dalam perjalanan sejarah perjuangan bangsa, maka pemberdayaan generasi muda melalui organisasi kepemudaan haruslah diartikan sebagai keseluruhan upaya pendidikan politik baik secara sadar, berencana, terarah, teratur, berkesinambungan dan bertanggung jawab.

Organisasi kepemudaan dengan fungsi minimumnya adalah pembentukan karakter generasi muda, kaderisasi, pengembangan bakat dan kemampuan. Oleh sebab itu di rasa sangat penting akan adanya peranan pemerintah untuk memberdayakan secara sungguh-sungguh organisasi kepemudaan yang ada khususnya di Kabupaten Pinrang.

Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2009 Tentang Kepemudaan bahwa:

“Pasal 9 dan 13 ditegaskan bahwa: pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bersinergi dalam pelayanan kepemudaan dalam upaya pemberdayaan. Sedangkan pada Pasal 8, disebutkan bahwa

strategi pelayanan kepemudaan adalah bela Negara, kompetisi dan apresiasi pemuda, peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki, dan pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Sementara itu dalam UU Nomor 40 tahun 2009 pasal 45 ayat 1 dan 2 yakni:

“(1)Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi organisasi kepemudaan, organisasi kepelajaran, dan organisasi kemahasiswaan, (2) satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan wajib memfasilitasi organisasi kepelajaran dan organisasi kemahasiswaan sesuai dengan ruang lingkupnya”

Selain itu esensi pemberdayaan generasi muda sebagaimana pada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2009 Pasal 24 dan 25 dijelaskan bahwa

“pemberdayaan pemuda dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda”.

Pemerintah adalah suatu yang urgen bagi proses kehidupan pada semua strata masyarakat antara lain, mengenai generasi muda sebagai penerima tongkat estafet dalam pembangunan daerah maupun nasional. Sejarah telah membuktikan bahwa masyarakat, sekecil apapun kelompoknya bahkan sebagai individu sekalipun, membutuhkan pelayanan pemerintah, secara sadar ataupun tidak, harus kita akui bahwa banyak sisi kehidupan kita yang tidak lepas dari pelayanan pemerintah.Suatu realitas kehidupan dalam masyarakat jika tanpa adanya pelayanan pemerintah,

maka masyarakat akan melahirkan berbagai bentuk kekerasan dan kekacauan dan yang paling rentan ditingkat generasi muda, kehadiran pemerintah adalah untuk mengatur dan melindungi serta mendapat memberikan fasilitas agar senantiasa dalam keadaan yang stabil maupun dinamis.

Pada sisi lain pemerintah telah menemukan fungsi utama pemerintah yaitu: pengaturan (regulation) dan fungsi pelayanan (service), keterbatasan kemampuan pemerintah menimbulkan konsekuensi logis bagi didistribusikannya urusan-urusan sampai pada tingkatan masyarakat yang paling bawah. Peranan pemerintah dalam peningkatan peri kehidupan berbangsa dan bernegara juga tergantung dari berapa besar pemerintah memperhatikan generasi muda sebagai tongkat estafet dan agen perubahan.

Berdasarkan asas otonomi daerah, Pemerintah daerah memiliki hak untuk menyesuaikan kebutuhan sesuai dengan Undang-Undang untuk membuat dinas terkait yang mampu menangani tugas yang dimaksudkan dalam hal ini masalah organisasi kepemudaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang membuat struktur organisasi, yakni Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga yang diharapkan mampu mengefektifkan tugasnya untuk lebih kooperatif antara pihak pemerintah dan organisasi-organisasi kepemudaan.

Dinas yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang adalah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang kemudian disingkat dengan Dispaspor. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga membawahi 4 bidang, yakni bidang pengembangan usaha dan pemasaran kepariwisataan, pengembangan SDM pariwisata, Bidang Kepemudaan, dan Bidang Keolahragaan. Bidang Kepemudaan kemudian bertanggung jawab dalam organisasi kepemudaan.

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebuah Kabupaten. Disamping itu Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok membantu Pimpinan dalam menyelenggarakan urusan di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Pemerintah memiliki tiga fungsi yakni fungsi Pelayanan, Pemberdayaan dan Fungsi Pembangunan, masalah keorganisasian kepemudaan ini kemudian menjadi tugas pemerintah di bidang pemberdayaan Pemuda. Pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga memberdayakan organisasi kepemudaan melalui penetapan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pendanaan serta pengawasan terhadap kegiatan organisasi kepemudaan tersebut.

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pinrang mencatat ada lebih dari 40 organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Pinrang. Dari sekian banyaknya organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Pinrang tentu saja pasti ada masalah-masalah internal maupun eksternal yang tidak dapat diatasi sendiri oleh setiap organisasi-organisasi kepemudaan yang ada. Hal ini tentu menjadi tugas penting pemerintah daerah untuk mencari cara bagaimana memberdayakan serta menyelesaikan semua masalah-masalah yang terjadi di organisasi kepemudaan yang ada.

Pada pra penelitian yang dilakukan penulis menemukan fakta dilapangan bahwa pemberdayaan organisasi kepemudaan yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Pinrang belum bisa dikatakan berhasil, hal ini ditandai oleh adanya laporan dan keluhan dari berbagai organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Pinrang tentang kurangnya kepedulian pemerintah daerah terhadap organisasi kepemudaan di Kabupaten pinrang baik dalam hal moral maupun moril.

Salah satu bentuk ketidak pedulian pemerintah daerah dalam hal pemberdayaan organisasi kepemudaan juga dapat dilihat dari tidak adanya peraturan daerah yang secara khusus dibuat untuk membahas tentang organisasi kepemudaan di Kabupaten Pinrang sehingga hal ini dapat dianggap sebagai tindakan yang lamban oleh pemerintah daerah dalam hal menangani masalah organisasi kepemudaan.

Dari masalah yang penulis dapatkan di lapangan pada pra penelitian, penulis kemudian membatasi objek penelitian pada satu organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Pinrang yakni Kerukunan Mahasiswa Pinrang Universitas Hasanuddin (KMP-UNHAS). Alasan penulis memilih KMP-UNHAS sebagai objek penelitian dikarenakan penulis menilai bahwa KMP-UNHAS adalah organisasi kepemudaan yang paling banyak berkontribusi terhadap Kabupaten Pinrang, hal ini dapat dilihat dari banyaknya program kerja yang telah dilaksanakan yang tujuannya demi membangun generasi muda di Kabupaten Pinrang.

Memahami pentingnya organisasi kepemudaan serta pentingnya peran pemerintah daerah dalam hal ini Dispaspor dalam memberdayakan organisasi kepemudaan, maka keinginan penulis untuk mengidentifikasi lebih jauh mengenai masalah pemberdayaan organisasi kepemudaan di Kabupaten Pinrang dengan mengangkat judul penelitian **"Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Di Kabupaten Pinrang"**.

1.2 Rumusan Masalah

Memperhatikan uraian di atas terlihat bahwa peran pemerintah daerah dalam memberdayakan organisasi kepemudaan di Kabupaten Pinrang belum bisa dikatakan berhasil. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang menjadi fokus perhatian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1 Bagaimana peran Pemerintah daerah dalam memberdayakan organisasi kepemudaan di kabupaten Pinrang ?
- 2 Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat peran Pemerintah daerah dalam memberdayakan organisasi kepemudaan di Kabupaten Pinrang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan peranan Pemerintah daerah dalam pemberdayaan organisasi kepemudaan di Kabupaten Pinrang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat peran Pemerintah daerah dalam memberdayakan organisasi kepemudaan di Kabupaten Pinrang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Praktis, dari hasil penelitian ini kemudian dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi bagi pelaksanaan program pemerintah daerah Kabupaten Pinrang.
2. Manfaat Akademis, dapat memberikan tambahan teori/ literatur dalam studi pemberdayaan masyarakat melalui organisasi

Kepemudaan dengan sinkronisasinya terhadap penyelenggaraan otonomi daerah.

3. Kegunaan Metodologi, hasil dalam penelitian ini kemudian dapat menjadikan sebuah dorongan moril dalam penelitian selanjutnya mengenai pembahasan yang serupa tentunya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep peran

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.

Menurut Abu Ahmadi (1982) peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total *enforcement*, yaitu penegakan hukum secara penuh, (Soerjono Soekanto 1987: 220)

Sedangkan peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang

diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Misalnya dinas perhubungan sebagai suatu organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, artinya peranan yang nyata, (Soerjono Soekamto).

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan / diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (role). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas ada baiknya terlebih dahulu kita pahami tentang pengertian peran, (Miftah Thoha, 1997).

perhubungan.

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Berdasarkan hal-hal diatas dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan dengan dinas pariwisata,

pemuda dan olahraga, peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas dan wewenang dinas tersebut.

2.2 Konsep pemerintahan

Pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti menyuruh melakukan sesuatu. Istilah pemerintahan diartikan sebagai perbuatan dalam artian bahwa cara, hal urusan dan sebagainya dalam memerintah (Sri Soemantri, 1976: 17), sehingga secara etimologi, dapat diartikan sebagai tindakan yang terus menerus (kontinue) atau kebijaksanaan dengan menggunakan suatu rencana maupun akal (rasio) dan tata cara tertentu untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki (Utrecht, 1986: 28). Sedangkan definisi lain mengartikan bahwa pemerintah ialah jawatan atau aparatur dalam susunan politik (Muhammad Yamin, 1982: 112)..

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan dalam badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif (C.F. Strong).

Dari definisi di atas mengungkapkan bahwa Pemerintahan adalah aktivitas yang dilakukan aparatur negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya. Jadi bukan hanya eksekutif yang berperan dalam menyelenggarakan urusan negara melainkan eksekutif, legislatif dan yudikatif harus bersinergi dalam menyelenggarakan urusan negara.

Dalam Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah kepala daerah, yaitu kepala daerah pada umumnya, seperti gubernur, bupati, dan wali kota, serta anggota DPRD. Kedudukan anggota DPRD sederajat sama tinggi dengan bupati, di mana kepala daerah memimpin bidang eksekutif dan DPRD bergerak di bidang legislatif. Dalam hal pembuatan peraturan daerah (PERDA), kepala daerah dan anggota DPRD harus bersama-sama dalam pembuatan PERDA. Tugas utama kepala daerah sebagai unsur pemerintah daerah adalah memimpin penyelenggaraan dan bertanggung jawab penuh atas jalannya pemerintahan daerah.

Bintoro Tjokroamidjojo dalam bukunya Pengantar Ilmu Administrasi Pembangunan menyebutkan pula peranan dan fungsi pemerintah sebagai berikut : Perencanaan serta fungsi pemerintah terhadap perkembangan masyarakat tergantung pada beberapa hal; pertama adalah filsafat hidup kemasyarakatan dan politik masyarakat. Ada negara yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada anggota masyarakatnya untuk menumbuh-kembangkan masyarakat sehingga pemerintah diharapkan tidak terlalu banyak campur tangan dalam kegiatan masyarakat. Pada masa lampau dalam bentuk yang eksterm, hal ini didukung oleh filsafat kemasyarakatan Laissez Faire namun ada pula nagara yang filsafat hidupnya menghendaki negara dan pemerintah memimpin serta mengurus segala sesuatu dalam kehidupan masyarakatnya, seperti filsafat politik tradisional. Hal ini berkaitan dengan suatu pandangan bahwa pemerintah

sebagai pemegang mandat untuk mengusahakan kepentingan dan keadilan dalam masyarakat secara keseluruhan. Ini perlu dinyatakan dan tetap memperhatikan kepentingan golongan ekonomi lemah.

Ryas Rasyid membagi fungsi pemerintahan menjadi empat bagian yaitu ;

1. Fungsi pelayanan (public service)
2. Fungsi pembangunan (development)
3. Fungsi pemberdayaan (empowering)
4. Fungsi pengaturan (regulation)

Berdasarkan teori diatas pemerintah memiliki fungsi pemberdayaan (empowering) dimana pemerintah wajib mewadahi masyarakat dalam mengembangkan bakat dan keterampilan yang dimiliki masyarakatnya. Jika dikaitkan dalam hal pemberdayaan organisasi kepemudaan pemerintah harus mampu mewadahi pemuda yang ingin menyalurkan minat dan bakatnya agar dapat menghasilkan pemuda yang berprestasi dan berguna bagi bangsa.

2.3 Konsep Pemerintahan Daerah

Keberadaan pemerintahan daerah secara tegas dijamin dan diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi

atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dari pengertian tersebut ada beberapa kata kunci yang perlu kalian pahami, yaitu:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan Urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah mencakup semua urusan pemerintahan kecuali beberapa urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, serta agama.
2. Pemerintah daerah dan DPRD Pemerintah daerah dan DPRD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai kedudukan yang sejajar. Sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah berkedudukan sebagai lembaga eksekutif di daerah yang terdiri atas kepala daerah/wakil

kepala daerah dan perangkat daerah, sedangkan DPRD berkedudukan sebagai lembaga legislatif di daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Pemerintahan daerah memiliki dua tingkatan, yaitu:

- a. Pemerintahan daerah provinsi dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi (Gubernur/Wakil Gubernur dan perangkat daerah provinsi) dan DPRD Provinsi.
- b. Pemerintahan daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota (Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota dan perangkat daerah kabupaten/kota) dan DPRD Kabupaten/Kota.

2.4 Konsep Pemberdayaan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang artinya kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak. Istilah pemberdayaan semakin populer dalam konteks pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Konsep pemberdayaan ini berkembang dari realitas individu atau masyarakat yang tidak berdaya (*powerless*). Ketidakberdayaan yang dimaksud mencakup pengetahuan, pengalaman, sikap, keterampilan, modal usaha, networking, semangat, kerja keras, ketekunan, dan lainnya. Ketidakberdayaan dari aspek tadi mengakibatkan ketergantungan dan kemiskinan.

Pemberdayaan (empowerment) merupakan konsep yang berkaitan dengan kekuasaan (power). Istilah kekuasaan seringkali identik dengan Kemampuan individu untuk membuat dirinya atau pihak lain melakukan apa yang diinginkannya. Dengan kata lain, kekuasaan menjadikan orang lain sebagai objek dari pengaruh atau keinginan dirinya.

Menurut **Djohani** dalam buku karya **Oos M. Anwas (49:2013)**, pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/kekuasaan (power) kepada pihak yang lemah (powerless), dan mengurangi kekuasaan (disempowered) kepada pihak yang terlalu berkuasa (powerful) sehingga terjadi keseimbangan. Pengertian pemberdayaan tersebut menekankan pada aspek pendelegasian kekuasaan, memberi wewenang, atau pengalihan kekuasaan kepada individu atau masyarakat sehingga mampu mengatur diri dan lingkungannya sesuai dengan keinginan, potensi, dan kemampuan yang dimilikinya.

Pemberdayaan tidak sekedar memberikan kewenangan atau kekuasaan kepada pihak yang lemah saja. Dalam pemberdayaan terkandung makna proses pendidikan dalam meningkatkan kualitas individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mampu berdaya, memiliki daya saing, serta mampu hidup mandiri.

Menurut **Parsons** dalam buku karya **Oos M. Anwas (49:2013)**, pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

Selanjutnya menurut **Ife** dalam buku karya **Oos M. Anwas (49:2013)**, pemberdayaan adalah menyiapkan kepada masyarakat berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat dalam menentukan masa depan mereka, serta berpartisipasi dan memengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri.

Dalam pelaksanaannya, pemberdayaan memiliki makna dorongan atau motivasi, bimbingan atau pendampingan dalam meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat agar mampu hidup mandiri. Berangkat dari hal ini, perbedaan karakter dari setiap individu adalah suatu keniscayaan. Dengan demikian pemberdayaan merupakan proses meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat untuk berdaya yang dilakukan secara demokratis agar mampu membangun diri dan lingkungannya dalam meningkatkan kualitas kehidupannya sehingga mampu hidup mandiri dan sejahtera.

Pemberdayaan juga menekankan pada proses, bukan semata-mata hasil (output) dari proses tersebut. Oleh karena itu ukuran keberhasilan pemberdayaan adalah seberapa besar partisipasi atau keberdayaan yang dilakukan oleh individu atau masyarakat. Semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam proses tersebut, berarti semakin berhasil kegiatan pemberdayaan tersebut. Keberdayaan dalam konteks organisasi kepemudaan merupakan kemampuan individu dalam hal ini pemuda dalam berpartisipasi aktif dalam organisasi kepemudaan. Tingkat partisipasi ini

meliputi partisipasi secara fisik, mental, dan juga manfaat yang diperoleh oleh individu yang bersangkutan.

2.5 Konsep Pembinaan

Pembinaan secara etimologi berasal dari kata bina. Pembinaan adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik.

2.5.1. Pengertian pembinaan menurut para ahli

Pembinaan menurut Masdar Helmi adalah segala hal usaha, ikhtiar dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian segala sesuatu secara teratur dan terarah.

Menurut Mathis (2002:112), pembinaan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, proses ini terkait dengan berbagai tujuan organisasi, pembinaan dapat dipandang secara sempit maupun luas.

Sedangkan Ivancevich (2008:46), mendefinisikan pembinaan sebagai usaha untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam pekerjaannya sekarang atau dalam pekerjaan lain yang akan dijabatnya segera.

Selanjutnya sehubungan dengan definisi tersebut, Ivancevich mengemukakan sejumlah butir penting yaitu, pembinaan

adalah sebuah proses sistematis untuk mengubah perilaku kerja seorang/sekelompok pegawai dalam usaha meningkatkan kinerja organisasi. Pembinaan terkait dengan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk pekerjaan yang sekarang dilakukan. Pembinaan berorientasi ke masa sekarang dan membantu pegawai untuk menguasai keterampilan dan kemampuan (konpetensi) yang spesifik untuk berhasil dalam pekerjaannya.

Pembinaan juga dapat diartikan sebagai bantuan dari seseorang atau sekelompok orang yang ditujukan kepada orang atau sekelompok orang lain melalui materi pembinaan dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuan, sehingga tercapai apa yang diharapkan.

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa dalam pembinaan terdapat unsur tujuan, materi, proses, cara, pembaharuan, dan tindakan pembinaan. Selain itu, untuk melaksanakan kegiatan pembinaan diperlukan adanya perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian.

2.5.2. Karakteristik Pembinaan

Menurut French dan Bell yang dikutip oleh Miftah Thoha dalam bukunya *Pembinaan Organisasi* mengidentifikasikan karakteristik pembinaan, yaitu :

- Lebih memberikan penekanan walaupun tidak eksklusif pada proses organisasi dibandingkan dengan isi yang substantif.

- Memberikan penekanan pada kerja tim sebagai suatu kunci untuk mempelajari lebih efektif mengenai berbagai perilaku.
- Memberikan penekanan pada manajemen yang kolaboratif dari budaya kerja tim.
- Memberikan penekanan pada manajemen yang berbudaya sistem keseluruhan.
- Mempergunakan model “action research”.
- Mempergunakan ahli-ahli perilaku sebagai agen pembaharuan atau katalisator.
- Suatu pemikiran dari usaha-usaha perubahan yang ditujukan bagi proses-proses yang sedang berlangsung.
- Memberikan penekanan kepada hubungan-hubungan kemanusiaan dan sosial.

Dengan memahami karakteristik diatas, membedakan setiap perubahan, pengembangan atau pembinaan yang dapat dijadikan suatu ukuran yang dapat membedakan antara pembinaan dengan usaha-usaha pembaharuan dan pembinaan lainnya.

2.5.3. Proses Pembinaan

1. Teknik Pembinaan

Teknik pembinaan merupakan suatu pekerjaan yang sangat kompleks, yang ditujukan untuk melaksanakan setiap kegiatan. Teknik yang dimaksud adalah bagaimana setiap pegawai dalam

melaksanakan pekerjaannya mempunyai hasil yang sempurna dengan mencapai efisiensi. Penggunaan daripada teknik ini tidak hanya untuk mencapai efisiensi, tetapi juga terhadap kualitas pekerjaannya dan keseragaman daripada hasil yang diharapkan. Teknik ialah berhubungan dengan cara atau jalan bagaimana suatu kebijakan itu dilakukan.

Teknik pembinaan bertujuan untuk mengetahui secara pasti arus dari pada informasi yang diperlukan, yang diperoleh dari suatu kegiatan pembinaan yang berwujud data-data, dimana setiap orang terlibat lebih mendetail dan telah dipraktekkan secara luas di dalam kegiatan pembinaan. Teknik-teknik dalam suatu pembinaan yang fokusnya luas dan pada umumnya berjangka panjang, seperti pendapat Mintzberg yang dikutip oleh Alfonsus Sirait dalam bukunya Manajemen menggambarkan empat cara mengenai teknik-teknik dalam suatu pembinaan, yaitu :

1. Teknik Adaptif (teknik yang berliku-liku).

Teknik yang sifatnya relatif dan terfragmentasi serta fleksibilitas, yakni suatu teknik yang mampu berjalan berliku-liku dalam menghadapi suatu hambatan.

2. Teknik Perencanaan (planning strategy).

Teknik ini memberikan kerangka pedoman dan petunjuk arah yang jelas. Menurut teknik ini perencanaan tingkat puncak mengikuti suatu prosedur sistematis yang

mengharuskan menganalisis lingkungan dan lembaga/organisasi, sehingga dapat mengembangkan suatu rencana untuk bergerak ke masa depan.

3. Teknik Sistematis dan Terstruktur.

Teknik yang berdasarkan pilihan yang rasional mengenai peluang dan ancaman yang terdapat di dalam lingkungan dan yang disusun begitu rupa, supaya sesuai dengan misi dan kemampuan lembaga/organisasi.

4. Teknik Inkrementalisme Logis.

Merupakan suatu teknik perencanaan yang mempunyai gagasan yang jelas mengenai tujuan lembaga/organisasi dan secara informal menggerakkan lembaga/organisasi ke arah yang diinginkan. Dengan teknik ini paling sesuai dengan situasi tertentu untuk mendorong lembaga/organisasi secara tahap demi tahap menuju sasarannya.

Atas dasar itu, maka salah satu alternatif harus dipilih atau sudah menentukan pilihannya daripada beberapa alternatif itu.

2.5.4. Strategi Pembinaan

Strategi dapat didefinisikan paling sedikit dari dua perspektif yang berbeda dari perspektif apa yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi, dan juga dari perspektif apa yang pada akhirnya dilakukan oleh sebuah organisasi. Dari perspektif yang pertama strategi adalah

program yang luas untuk mendefinisikan dan mencapai tujuan organisasi serta melaksanakan fungsinya. Kata “program” menyiratkan adanya peran yang aktif, yang disadari dan yang rasional dalam merumuskan strategi. Dari perspektif yang ke dua, strategi adalah pola tanggapan organisasi yang dilakukan terhadap lingkungannya sepanjang waktu.

Menurut Robert H. Hayes yang dikutip oleh Alfonsus Sirait dalam bukunya Manajemen mengidentifikasi lima ciri utama dari strategi pembinaan (directing strategy), yaitu :

1. Wawasan waktu (time horizon).

Strategi dipergunakan untuk menggambarkan kegiatan yang meliputi waktu yang jauh ke depan, yaitu waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dan juga waktu yang diperlukan untuk mengamati dampaknya.

2. Dampak (impact).

Dengan mengikuti suatu strategi tertentu, dampak akhirnya akan sangat berarti.

3. Pemusatan Upaya (concentration of effort).

Sebuah strategi yang efektif mengharuskan pusat kegiatan, upaya atau perhatian terhadap rentang sasaran yang sempit.

4. Pola Keputusan (pattern decision).

Keputusan-keputusan harus saling menunjang, artinya mengikuti suatu pola yang konsisten.

5. Peresapan.

Suatu strategi mencakup spektrum kegiatan yang luas mulai dari proses alokasi sumber daya sampai dengan kegiatan dalam pelaksanaannya.

Strategi pembinaan adalah upaya menciptakan kesatuan arah bagi suatu organisasi dari segi tujuannya yang berbagai macam itu, dalam memberikan pengarahan dan mengarahkan sumber daya untuk mendorong organisasi menuju tujuan tersebut. Menurut Mintberg dalam bukunya *Strategy Making in Three Model* yang dikutip oleh Alfonsus Sirait dalam bukunya *Manajemen* mendefinisikan tentang strategi pembinaan adalah, bahwa :

“Strategi pembinaan merupakan proses pemilihan tujuan, penentuan kebijakan dan program yang perlu untuk mencapai sasaran tertentu dalam rangka mencapai tujuan dan penetapan metode yang perlu untuk menjamin agar kebijakan dan program tersebut terlaksana”.
(Sirait,1991:143).

2.5.5. Hasil Pembinaan

Pembinaan adalah suatu proses yang berkesinambungan dan tidak ada rencana pembinaan bersifat final, tetapi selalu merupakan bahan untuk diadakan perbaikan. Oleh karena itu pembinaan bukan merupakan hasil daripada proses perencanaan, tetapi hanya sebagai laporan sementara (interiwn report). Hasil pembinaan adalah spesifikasi dari tujuan-tujuan/sasaran-sasaran target dari perencanaan yang

ditentukan dengan apa yang ingin dicapai, dan bagaimana mencapainya. Pada suatu deretan, fakta-fakta dan pandangan untuk waktu yang akan datang, maka harus menyimpulkan apa yang akan mempengaruhi tujuan dari kegiatan tersebut *“hasil yang akan dicapai”*.

Jelasnya, hasil pembinaan dengan maksud/tujuan untuk mencapai tujuan organisasi itu adalah merupakan suatu pertimbangan yang pokok dalam halnya pengambilan keputusan, maka efisiensi sangat diperlukan, karena efisiensi merupakan perbandingan yang terbaik antar input dan output (hasil pelaksanaan dengan sumber-sumber yang dipergunakan) jadi tujuan hasil pembinaan adalah untuk mencapai efektif (berhasil guna) dan efisien (berdaya guna).

2.6 Konsep Pengawasan Organisasi

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi. Dimana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Suatu Pengawasan dikatakan penting karena Tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasinya itu sendiri maupun bagi para pekerjanya. Di dalam suatu organisasi terdapat tipe-tipe pengawasan yang digunakan, seperti pengawasan Pendahuluan (preliminary control), Pengawasan pada saat kerja berlangsung (cocurrent control), Pengawasan Feed Back (feed back control).Di dalam proses

pengawasan juga diperlukan Tahap-tahap pengawasan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tahap-tahap pengawasan tersebut terdiri dari beberapa macam, yaitu Tahap Penetapan Standar, Tahap Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan, Tahap Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan, Tahap Pembandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisa Penyimpangan dan Tahap Pengambilan Tindakan Koreksi. Suatu Organisasi juga memiliki perancangan proses pengawasan, yang berguna untuk merencanakan secara sistematis dan terstruktur agar proses pengawasan berjalan sesuai dengan apa yang dibutuhkan atau direncanakan. Untuk menjalankan proses pengawasan tersebut dibutuhkan alat bantu manajerial dikarenakan jika terjadi kesalahan dalam suatu proses dapat langsung diperbaiki. Selain itu, pada alat-alat bantu pengawasan ini dapat menunjang terwujudnya proses pengawasan yang sesuai dengan kebutuhan. Pengawasan juga meliputi bidang-bidang pengawasan yang menunjang keberhasilan dari suatu tujuan organisasi diantaranya.

2.6.1. Pengertian Pengawasan Menurut Para Ahli

Pengawasan bisa didefinisikan sebagai suatu usaha sistematis oleh manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia

digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin didalam mencapai tujuan.

George R. Terry (2006:395) mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Robbin (dalam Sugandha, 1999 : 150) menyatakan pengawasan itu merupakan suatu proses aktivitas yang sangat mendasar, sehingga membutuhkan seorang manajer untuk menjalankan tugas dan pekerjaan organisasi.

Kertonegoro (1998 : 163) menyatakan pengawasan itu adalah proses melalui manajer berusaha memperoleh keyakinan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaannya.

Terry (dalam Sujamto, 1986 : 17) menyatakan Pengawasan adalah untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi atasannya, dan mengambil tindakan-tindakan korektif bila diperlukan untuk menjamin agar hasilnya sesuai dengan rencana.

Dale (dalam Winardi, 2000:224) dikatakan bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan

meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan.

Admosudirdjo (dalam Febriani, 2005:11) mengatakan bahwa pada pokoknya pengawasan adalah keseluruhan daripada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Siagian (1990:107) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

2.6.2. Tipe-tipe Pengawasan

Donnelly, et al. (dalam Zuhad, 1996:302) mengelompokkan pengawasan menjadi 3 Tipe pengawasan yaitu :

1. Pengawasan Pendahuluan (preliminary control).
2. Pengawasan pada saat kerja berlangsung (cocurrent control)
3. Pengawasan Feed Back (feed back control)

1. Pengawasan Pendahuluan (preliminary control).

Pengawasan yang terjadi sebelum kerja dilakukan. Pengawasan Pendahuluan menghilangkan penyimpangan penting pada kerja yang diinginkan yang dihasilkan sebelum penyimpangan tersebut terjadi. Pengawasan Pendahuluan mencakup semua upaya manajerial guna memperbesar kemungkinan bahwa hasil-hasil aktual akan berdekatan hasilnya dibandingkan dengan hasil-hasil yang direncanakan. Memusatkan perhatian pada masalah mencegah timbulnya deviasi-deviasi pada kualitas serta kuantitas sumber-sumber daya yang digunakan pada organisasi-organisasi. Sumber-sumber daya ini harus memenuhi syarat-syarat pekerjaan yang ditetapkan oleh struktur organisasi yang bersangkutan.

Dengan ini, manajemen menciptakan kebijaksanaan-kebijaksanaan, prosedur-prosedur dan aturan-aturan yang ditujukan pada hilangnya perilaku yang menyebabkan hasil kerja yang tidak diinginkan di masa depan. Dipandang dari sudut prespektif demikian, maka kebijaksanaan-kebijaksanaan merupakan pedoman-pedoman yang baik untuk tindakan masa mendatang.

Pengawasan pendahuluan meliputi; Pengawasan pendahuluan sumber daya manusia, Pengawasan pendahuluan bahan-bahan, Pengawasan pendahuluan modal dan Pengawasan pendahuluan sumber-sumber daya financial.

2. Pengawasan pada saat kerja berlangsung (cocurrent control)

Pengawasan yang terjadi ketika pekerjaan dilaksanakan. Memonitor pekerjaan yang berlangsung guna memastikan bahwa sasaran-sasaran telah dicapai. Concurrent control terutama terdiri dari tindakan-tindakan para supervisor yang mengarahkan pekerjaan para bawahan mereka. Direction berhubungan dengan tindakan-tindakan para manajer sewaktu mereka berupaya untuk:

- Mengajarkan para bawahan mereka bagaimana cara penerapan metode--metode serta prosedur-prsedur yang tepat.
- Mengawasi pekerjaan mereka agar pekerjaan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

3. Pengawasan Feed Back (feed back control)

Pengawasan Feed Back yaitu mengukur hasil suatu kegiatan yang telah dilaksanakan, guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar.

Pengawasan yang dipusatkan pada kinerja organisasional dimasa lalu. Tindakan korektif ditujukan ke arah proses pembelian sumber daya atau operasi-operasi aktual. Sifat kas dari metode-metode pengawasan feed back (umpan balik) adalah bahwa dipusatkan perhatian pada hasil-hasil

historikal, sebagai landasan untuk mengoreksi tindakan-tindakan masa mendatang.

Adapun sejumlah metode pengawasan feed back yang banyak dilakukan oleh dunia bisnis yaitu:

- Analysis Laporan Keuangan (Financial Statement Analysis)
- Analisis Biaya Standar (Standard Cost Analysis)
- Pengawasan Kualitas (Quality Control)
- Evaluasi Hasil Pekerjaan Pekerja (Employee Performance Evaluation)

2.7 Konsep Pemuda

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 0059 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda pasal 1 menyatakan bahwa pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.

Secara umum terdapat pergeseran mengenai konsep pemuda. Pada dua dekade yang lalu, terminologi pemuda selalu memiliki makna ideologis. Pemuda, bukanlah sebuah gugus gagasan yang hanya dibatasi oleh persoalan umur semata. Pemuda, sebagai sebuah konsep, memiliki dimensi politis. Bennedict Anclerson, menyebut bahwa definisi “pemuda” selalu dikaitkan dengan dimensi politik. Sejak revolusi kemerdekaan,

pemuda adalah kelompok umur tertentu (15-40 tahun) yang menghaiskan sebagian besar-atau kalau tidak malah semua waktu longgar mereka dalam kegiatan yang sifatnya politis (Sudibyo, 2013:17). Bila generasi muda sebelumnya diklasifikasikan sebagai lapisan masyarakat yang digambarkan sebagai sebuah generasi yang diisi oleh sosok-sosok yang penuh idealisme, berani berkorban, berani menderita, dan menjadi pelopor setiap perubahan sosial ataupun politik untuk kepentingan bangsanya, maka generasi muda sekarang memiliki sosok yang sangat lain.

Persoalan keuangan dan karir adalah persoalan paling utama bagi generasi muda saat ini. Menurut pandangan mereka, sebagian pemuda generasi mereka saat ini bercita-cita ingin menjadi kaya dan terkenal. Sikap pragmatisme sebagian pemuda yang lebih mengedepankan kepentingan pribadi, yakni ingin kaya, terkenal, dan sukses dalam karier, berbanding terbalik dengan rendahnya partisipasi pemuda di bidang politik dan kemasyarakatan (Sudibyo, 2013:18). Ketertarikan untuk terjun di bidang politik, seperti menjadi anggota partai politik ataupun anggota legislatif, sangatlah rendah. Tidak hanya itu sebagian besar pemuda ternyata juga tidak tertarik untuk aktif di bidang sosial, seperti menjadi anggota organisasi kemasyarakatan, organisasi pemuda, dan lembaga swadaya masyarakat. Dari paparan yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa definisi pemuda yaitu suatu individu yang mengalami perkembangan fisik, mental dan emosional pada usia 15 tahun sampai 35 tahun.

2.8 Konsep Organisasi Kepemudaan

Kata “organisasi” mempunyai dua pengertian umum. Pengertian pertama menandakan suatu lembaga atau kelompok fungsional seperti organisasi perusahaan, rumah sakit, perwakilan pemerintah atau suatu kumpulan olahraga. Pengertian kedua berkenaan dengan proses pengorganisasian, sebagai suatu cara dimana kegiatan organisasi dialokasikan dan ditugaskan di antara para anggotanya agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisien (Handoko 2000: 167). Menurut James A.F. Stoner (1996: 6), organisasi adalah dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam cara yang terstruktur untuk mencapai sasaran spesifik atau sejumlah sasaran. Jadi organisasi merupakan sekumpulan orang yang bekerja sama dengan sistem tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan.

Sebuah organisasi dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat. Organisasi yang dianggap baik adalah organisasi yang dapat diakui keberadaannya oleh masyarakat disekitarnya, karena memberikan kontribusi seperti; pengambilan sumber daya manusia dalam masyarakat sebagai anggota-anggotanya sehingga menekan angka pengangguran.

Dengan jumlahnya yang mencapai 62,92 juta jiwa, pemuda merupakan salah satu kekuatan terbesar bagi bangsa Indonesia. Jumlah

ini merupakan populasi yang sangat besar, karena itu pemuda memiliki posisi yang strategis bagi bangsa Indonesia. Dengan jumlah sebesar itu, pemuda terbagi dalam berbagai organisasi, baik organisasi kepemudaan seperti KNPI yang telah tersusun rapi dari tingkat pusat hingga ke daerah maupun yang lainnya (Sholehuddin 2008: 10).

Organisasi kepemudaan adalah lembaga nonformal yang tumbuh dan eksis dalam masyarakat antara lain ikatan remaja masjid, kelompok pemuda (karang taruna) dan sebagainya (Warastuti, 2006). Pengertian lain menyatakan organisasi kepemudaan adalah organisasi sosial wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat yang bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial.

Pada dasarnya organisasi kepemudaan memiliki tujuan terarah yang sesuai dengan program kerja dari organisasi tersebut, namun secara khusus yang terlihat pada saat sekarang sangat berbeda bila dibandingkan dengan tujuan dari organisasi kepemudaan yang ada pada awal kemerdekaan. Hal ini sesuai dengan kemajuan zaman yang dinamis dengan kinerja dan program pemerintah yang berkuasa. Satu organisasi terbentuk berdasarkan atas suatu perencanaan yang memiliki visi dan misi serta memiliki aturan yang mengikat atau berbadan hukum yang diakui. Dalam organisasi juga tercantum suatu tujuan yang harus dicapai sesuai dengan bentuk organisasi tersebut bergerak pada bidang apa dan

bagaimana cara kerjanya. Bila dilihat dari tujuan organisasi kepemudaan yang ada pada saat awal kemerdekaan, suatu organisasi pemuda hanya bergerak dalam pendidikan dan seni budaya dan tidak terlalu jauh dari pada itu. Seperti halnya pada organisasi Boedi Oetomo yang direkrut sebagai anggota hanya terbatas dalam suatu wilayah. Namun seiring dengan berjalanya waktu suatu organisasi berubah dan berkembang tujuannya dan terbuka mengenai hal-hal yang bersifat umum, namun suatu organisasi diuntut untuk sangat peka terhadap lingkungan, kebijakan pemerintah, aparatur Negara, sosial dan keagamaan.

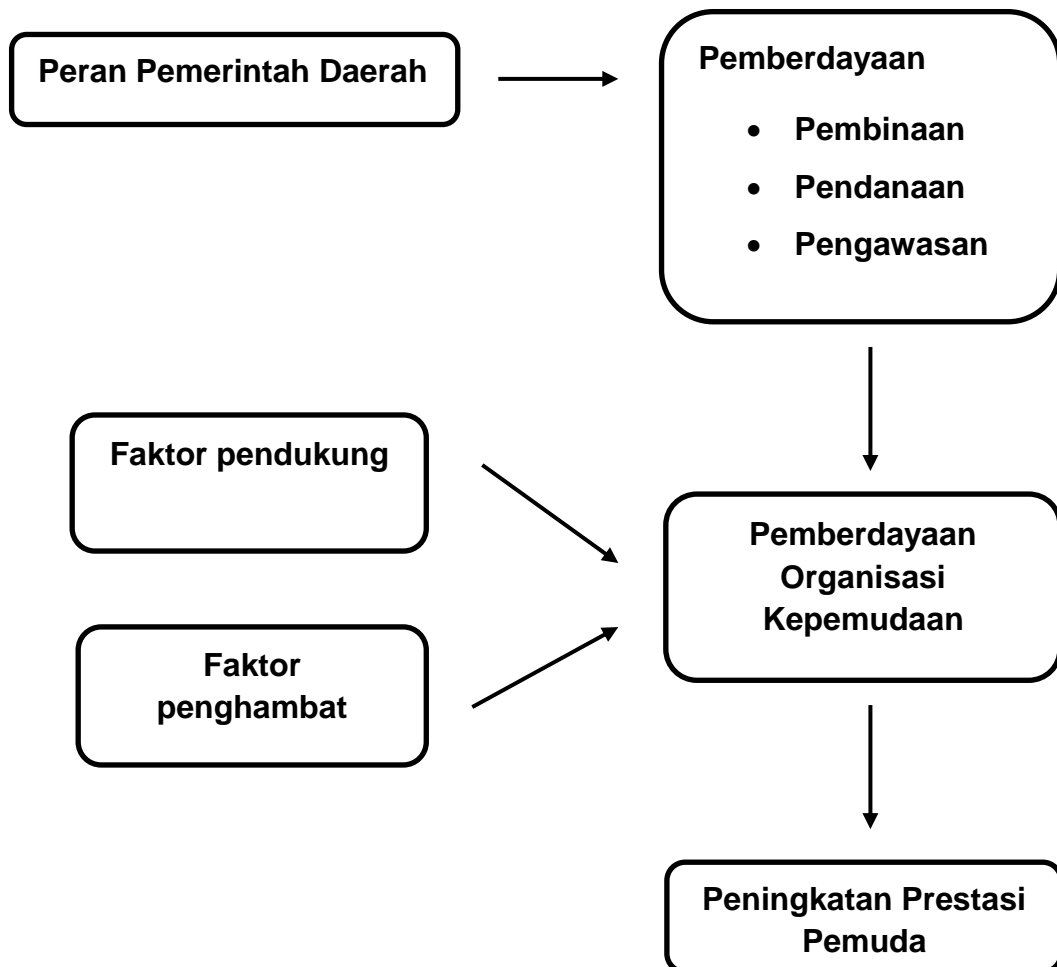
2.9 Konsep Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga (DISPASPOR)

Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga adalah salah satu instansi pemerintahan yang bergerak dalam bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga. Dinas ini bertugas dalam menyusun dan menyiapkan rencana strategis, mengkoordinasikan dengan instansi terkait, mengarahkan dan membuat petunjuk pelaksanaan teknis di bidang pariwisata pemuda dan olahraga dan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati serta melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas dalam lingkup pariwisata, pemuda dan olahraga dengan laporan secara berkala.

Dalam hal kepemudaan, semua hal kepentingan dikoordinasikan melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Pemerintah mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi bidang Kepemudaan secara nasional. Pemerintah daerah mempunyai

tugas untuk melaksanakan kebijakan dan mengoordinasikan pemberdayaan pemuda melalui organisasi kepemudaan serta melaksanakan standardisasi bidang kepemudaan di daerah. Ada kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, mendanai, dan mengawasi penyelenggaraan organisasi kepemudaan. Semua hal tersebut dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan yang dikoordinasikan oleh Menteri.

Kerangka Konsep



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan desain penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan di dalam rumusan penelitian. Pembahasan ini menjelaskan rasionalisasi terhadap rancangan penelitian yang dipilih, dan perdebatannya untuk memahami secara proporsional metode yang digunakan.

3.1 Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini “Peran pemerintah daerah dalam Pemberdayaan organisasi kepemudaan di Kabupaten Pinrang”, maka penelitian ini akan dilakukan di wilayah administratif Kabupaten Pinrang.

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif dengan teknik kualitatif, yaitu dimaksudkan untuk explorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan data dan fakta berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Dalam penelitian ini bertujuan memberikan gambaran secara jelas tentang peran pemerintah dalam pemberdayaan organisasi kepemudaan di Kabupaten Pinrang.

3.3 Informan Penelitian

Informan adalah orang-orang yang betul paham atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan yang dipilih adalah yang dianggap relevan dalam memberikan informasi. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pinrang
2. Kepala Bidang Pemuda Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pinrang
3. Ketua Kerukunan Mahasiswa Pinrang Universitas Hasanuddin KMP-UNHAS Priode 2017-2018
4. DPO Kerukunan Mahasiswa Pinrang Universitas Hasanuddin KMP-UNHAS Priode 2017-2018

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian adalah

sebagai berikut :

- 1) Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti secara langsung mengadakan tanya jawab dengan narasumber.
- 2) Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

- 3) Studi kepustakaan, yaitu dengan membaca buku, majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, undang-undang yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilaksanakan.
- 4) Penelusuran data *online*, yaitu data diperoleh dengan mengakses internet untuk mencari sumber data yang berhubungan dengan penelitian yang dilaksanakan.

3.5 Sumber Data

Dalam penelitian ini data-data yang diperoleh berdasarkan sumbernya dapat digolongkan berdasarkan sumbernya dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari informan dengan cara wawancara maupun pengamatan secara langsung, sedangkan data sekunder merupakan data yang bersumber dari dokumen-dokumen arsip tertentu yang berhubungan dengan penelitian.

3.6 Analisis Data

Di dalam penelitian ini, data yang telah dikumpulkan akan dianalisa secara deskriptif kualitatif yakni data yang diperoleh akan dianalisis dalam bentuk kata-kata lisan maupun tulisan. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari obyek penelitian. Serta hasil-hasil penelitian baik dari hasil studi lapang maupun studi literatur untuk kemudian memperjelas gambaran hasil penelitian.

3.7 Definisi Operasional

Agar lebih mudah dalam memberikan pemahaman dan mengarahkan penelitian maka penulis memberikan beberapa definisi operasional yang dijadikan sebagai acuan di dalam penelitian yakni sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah yang dimaksud adalah Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pinrang yang memiliki tugas pokok pada peningkatan prestasi pemuda di Kabupaten Pinrang.
2. Peran Pemerintah Daerah yang dimaksudkan adalah peran Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga di bidang pemuda. Baik dalam pembinaan, pendanaan maupun pengawasan yang berkaitan dengan pemberdayaan organisasi kepemudaan.
3. Organisasi kepemudaan yang dimaksud adalah Kerukunan Mahasiswa Pinrang universitas Hasanuddin (KMP-UNHAS)
4. Pelaksanaan Pemberdayaan organisasi kepemudaan yang dimaksudkan meliputi :
 - a) Pembinaan
 - b) Pendanaan
 - c) Pengawasan
5. Faktor-faktor yang berpengaruh adalah hal-hal yang dapat mendukung atau menghambat kinerja Pemerintah dalam upaya pemberdayaan organisasi kepemudaan di Kabupaten Pinrang.

BAB IV

HASIL PENEITIAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menjabarkan profil lokasi penelitian dan penjelasan hasil penelitian.

4.1 Profil Kabupaten Pinrang

4.1.1 Letak Geografis Kabupaten Pinrang

Kabupaten Pinrang adalah salah satu daerah dari 23 Kabupaten/Kota di Sulawesi selatan yang letaknya berada di bagian Barat Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan yang jaraknya sekitar 182 km arah utara dari Kota Makassar ibukota Propinsi Sulawesi selatan berada pada posisi letak geografis yaitu LS 4010'30"-30019'13"BT119026'30"-119047'20". Kabupaten Pinrang memiliki luas wilayah 196.177 Ha, terdiri dari tiga dimensi kewilayahan meliputi dataran rendah, laut dan dataran tinggi. Kabupaten Pinrang secara administrative pemerintahan terdiri dari 12 (dua belas) kecamatan, 36 Kelurahan dan 68 Desa yang meliputi 81 lingkungan dan 168 Dusun Sebagian besar dari wilayah kecamatan merupakan daerah pesisir yang memiliki luas 145,19 Km² atau 74% dari luas keseluruhan wilayah Kabupaten Pinrang dengan panjang garis pantai 101 Km.

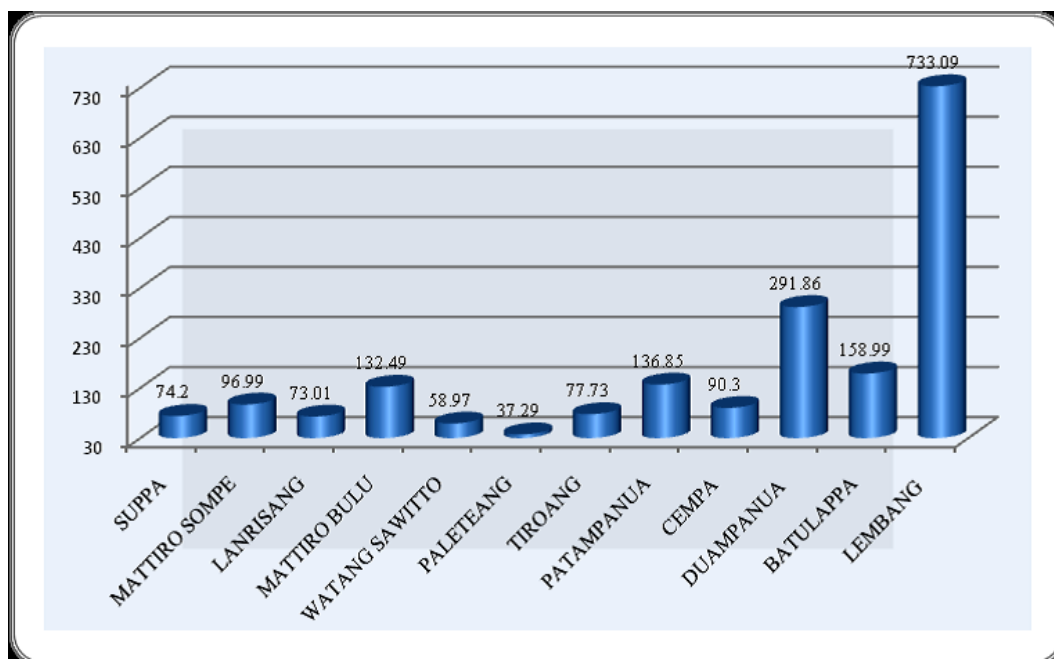
Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Pinrang sebagai berikut :

- Sebelah Selatan : Kotamadya Pare-pare

Kabupaten Pinrang merupakan salah satu Kabupaten di Sulawesi Selatan yang memiliki luas wilayah secara keseluruhan 1961,77 Km terbagi menjadi 12 Kecamatan yang meliputi 108 desa/kelurahan yakni 39 kelurahan dan 65 desa. Kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Pinrang yaitu Kecamatan Suppa, Kecamatan Mattiro Sompe, Kecamatan Lanrisang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kecamatan Watang Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kecamatan Tiroang, Kecamatan Patampanua, Kecamatan Cempa, Kecamatan Duampanua, Kecamatan Batulappa dan Kecamatan Lembang. Kecamatan Lembang merupakan Kecamatan terluas dengan luas sekitar 733,09 Km, sementara Kecamatan Paleteang merupakan kecamatan yang terkecil luas wilayahnya yaitu 37,29 Km dari luas Kabupaten Pinrang.

Tabel 4.1

Luas Wilayah Per Kecamatan di Kab. Pinrang



4.1.3 Tofografi

Kondisi topografi Kabupaten Pinrang memiliki rentang yang cukup lebar, mulai dari dataran dengan ketinggian 0 m di atas permukaan laut hingga dataran yang memiliki ketinggian di atas 1000 m di atas permukaan laut (dpl). Dataran yang terletak pada ketinggian 1000 m di atas permukaan laut sebagian besar terletak di bagian tengah hingga utara Kabupaten Pinrang terutama pada daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Toraja. Klasifikasinya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- Ketinggian 0 – 100 m dpl

Wilayah yang termasuk ke dalam daerah ketinggian ini sebagian besar terletak di wilayah pesisir yang meliputi beberapa wilayah Kecamatan yakni Kecamatan Mattiro Sompe, Lanrisang, Watang Sawtito, Tiroang, Patampanua dan Kecamatan Cempa.

- Ketinggian 100 – 400 m dpl

Wilayah yang termasuk ke dalam daerah dengan ketinggian ini meliputi beberapa wilayah Kecamatan yakni Kecamatan Suppa, Mattiro Bulu, dan Kecamatan Paleteang.

- Ketinggian 400 – 1000 m dpl

Wilayah yang termasuk ke dalam klasifikasi ketinggian ini sebagian kecil wilayah meliputi Kecamatan Duampanua. Ketinggian di atas 1000 m dpl Wilayah yang termasuk ke dalam klasifikasi ketinggian ini terdiri dari sebagian Kecamatan Lembang dan Batulappa

4.1.4 Geologi

Susunan lapisan Geologi wilayah Kabupaten Pinrang dari hasil pengamatan dan kompilasi Peta Geologi Kabupaten Pinrang, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Endapan alluvium dan sungai, Endapan alluvium dan sungai mempunyai ketebalan antara 100-150 meter, terdiri dari atas lempung, lanau, pasir dan kerikil. Pada umumnya endapan lapisan ini mempunyai kelulusan air yang bervariasi dan kecil hingga tinggi. Potensi air tanah dangkal cukup besar tetapi sebagian wilayah kualitasnya kurang baik. Muka air tanah dangkal 1-1,50 meter.
2. Batuan gunung api tersusun atas breksi dengan komponen bersusun trakht dan andesit, tufa batu apung, batu pasir terfaan, konglomerat dan breki terfaan, ketebalannya berkisar 500 meter, penyebarannya dibagian utara Kota Pinrang, Sekitar Bulu Lemo, Bulu Pakoro sedangkan dibagian selatan sekitar Bulu Manarang,

Bulu Paleteang, Bulu Lasako (berbatasan dengan Parepare).
Kearah Bunging terdapat batu gamping terumbu yang umumnya
relative sama dengan batuan gunung api.

3. Batuan aliran lava, Batuan aliran lava bersusun trakhit abu-abu muda hingga putih, bekekar tiang, penyebarannya kearah daerah Kabupaten Pinrang, yaitu sekitar Kecamatan Lembang dan Kecamatan Duampanua
4. Batuan konglomerat (Formasi Walanae), Batuan ini terletak dibagian Timur Laut Pinrang, sekitar Malimpung sampai kewilayah Kabupaten Sidrap, satuan batuan ini terdiri atas konglomerat, sedikit batu pasir glakonit dan serpih dan membentuk morfologi bergelombang dan tebalnya kira-kira hingga 400meter.
5. Batuan lava bersusun basol hingga andesit, Satuan batuan ini berbentuk lava bantal, breksi andesit piroksin dan andesit trakhit. Tebalnya 50 hingga 100 meter dengan penyebaran sekitar Bulu Tirasa dan Pakoro.
6. Batu pasir, Satuan batuan ini bersusun andesit, batu lanau, konglomerat dan breksi. Struktur sesar diperkirakan terdapat pada batuan aliran lava dan batu pasir bersusun andesit, berupa sesar normal.

4.1.5 Hidrologi

Di Kabupaten Pinrang, terdapat dua sungai besar yaitu sungai Mamasa dan Sungai Saddang, dimana sungai Mamasa sebenarnya masih merupakan anak sungai Saddang. Saat ini sungai Mamasa dimanfaatkan untuk keperluan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Bakaru yang berlokasi di Desa Ulu Saddang, Kecamatan Lembang PLTA Teppo di Kecamatan Patampanua. PLTA yang ada ini selain untuk memenuhi kebutuhan listrik di Kabupaten Pinrang, juga untuk memenuhi kebutuhan listrik di Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan Sungai Saddang dimanfaatkan untuk pengairan pertanian dengan cakupan pelayanan selain Kabupaten Pinrang juga melayani Kabupaten Sidrap dan sebagian Kabupaten Wajo.

4.1.6 Klimatologi

Klasifikasi iklim menurut Smith-Ferguson, tipe iklim Wilayah Kabupaten Pinrang termasuk tipe A dan B dengan curah hujan terjadi pada bulan Desember hingga Juni dengan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Maret. Musim kemarau terjadi pada bulan Juni sampai Desember. Kriteria tipe iklim menurut Oldeman-Syarifuddin bulan basah di Kabupaten Pinrang tercatat 7 -9 bulan, bulan lembab 1 - 2 bulan dan bulan kering 2 - 4 bulan. Tipe iklim menurut klasifikasi Oldeman - Syarifuddin adalah iklim B dan C. Curah hujan tahunan berkisar antara 1073 mm

sampai 2910 mm, Evaporasi rata-rata tahunan di Kabupaten Pinrang berkisar antara 5,5 mm/hari sampai 8,7 mm/hari. Suhu rata-rata normal antara 27°C dengan kelembaban udara 82% - 85%

Berdasarkan data dari Dinas PSDA kabupaten Pinrang dan UPTD PSDA Provinsi Bendung Benteng, rata-rata curah hujan di Kabupaten Pinrang pada tahun 2010 sebesar 277,42 mm/bulan. Curah hujan terendah terjadi pada bulan September yakni sebesar 80 Mm, sedangkan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Oktober yakni sebesar 698 Mm. Banyaknya curah hujan tiap bulan di wilayah Kabupaten Pinrang sejak tahun 2008 sampai 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.2

Banyaknya Curah Hujan di Wilayah Kabupaten Pinrang

BULAN	Tahun					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Januari	264	146	215	103	154	106
Pebruari	242	233	192	146	122	90
Maret	295	306	64	88	98	91
April	130	188	152	108	247	147
Mei	94	208	167	96	241	155
Juni	222	115	36	63	153	148
Juli	143	57	15	70	5	50
Agustus	199	41	-	32	2	26
September	80	51	2	17	3	109
Oktober	698	118	5	241	-	82
Nopember	571	167	175	74	66	96
Desember	391	543	228	137	241	129
Rata-Rata Per Bulan	277,42	181,08	113,73	97,92	111,00	102,42

• Sumber : Dinas PSDA Kabupaten Pinrang, 2014

4.1.7. Kawasan Budidaya

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Pinrang merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah Kabupaten Pinrang yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Pinrang berfungsi :

1. Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah Kabupaten Pinrang.
2. Mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang.
3. Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk dua puluh tahun, dan
4. Sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah Kabupaten Pinrang.

Dalam pengelolaan kawasan budidaya di wilayah Kabupaten Pinrang diterapkan azas harmonisasi yaitu menciptakan keseimbangan antara fungsi ekologi kawasan dengan manfaat fungsi ekonomis kawasan dalam arti melakukan eksplorasi kawasan dalam memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, dan budaya namun tetap memperhatikan daya dukung lahan sehingga ekosistem alami tetap terjaga.

a. Hutan Produksi Terbatas (HPT)

Kawasan hutan produksi di wilayah Kabupaten Pinrang tersebar di wilayah Kecamatan Batulappa, Kecamatan Lembang, dan Kecamatan Duampanua Kecamatan Mattiro Bulu dan Kecamatan Suppa dengan luas keseluruhan adalah 26.435,90 Ha. Hutan produksi terbatas di wilayah Kabupaten Pinrang juga merupakan bagian dari upaya pelestarian DAS Saddang. Untuk meningkatkan kualitas tata air di DAS Saddang ini, maka hutan produksi yang ada harus ditingkatkan kualitasnya melalui pengembangan vegetasi hutan utamanya tanaman tegakan tinggi yang memiliki fungsi kuat sebagai penjaga tata air.

b. Kawasan Pertanian

Kabupaten Pinrang merupakan salah satu wilayah sentra produksi beras di Propinsi Sulawesi Selatan yang termasuk Kawasan Bosowasipilu (kawasan sentra produksi beras) dengan luas areal persawahan potensial ± 44.861 Ha (22,87 % luas wilayah Kabupaten Pinrang). Jenis komoditi tanaman pangan selain padi yang merupakan komoditi unggulan antara lain: jagung, ubi kayu, kacang tanah, kacang hijau, dan kedele. Pada dasarnya persebaran produksi tanaman pangan jenis padi di wilayah Kabupaten Pinrang tersebar secara merata di seluruh wilayah, dimana semua wilayah kecamatan memiliki areal persawahan yang produktif dengan sumber pengairan dari irigasi teknis. Sedangkan Kawasan tanaman pangan lahan kering yang merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan kering untuk

tanaman palawija, hortikultura atau tanaman pangan tahunan, pengembangan kegiatannya tersebar merata diseluruh wilayah kecamatan dengan luas areal yang diarahkan untuk pengembangan lahan kering adalah 30.914 ha

Tabel 4.3

Arahan Kawasan Peruntukan Lahan Basah dan Lahan Kering

No	Kecamatan	Pertanian Lahan Basah		Pertanian Lahan Kering	
		Luas (Ha)	Persentase (%)	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Suppa	1,716	3.83	2503	8.10
2	Lanrisang	3,714	8.28	1015	3.28
3	Mattiro Bulu	4,822	10.75	3698	11.96
4	Mattiro Sompe	3,679	8.20	878	2.84
5	Paleteang	3,137	6.99	2251	7.28
6	Tiroang	4,835	10.78	2413	7.81
7	Watang sawitto	4,033	8.99	834	2.70
8	Patampanua	4,464	9.95	4394	14.21
9	Cempa	4,237	9.45	2240	7.25
10	Duampanua	7,671	17.10	7359	23.81
11	Batulappa	458	1.02	1798	5.82
12	Lembang	2,093	4.67	1530	4.95
Total		44,861	100.00	30,914	100.00

Sumber : RTRW Kabupaten Pinrang

Sedangkan Pengembangan kegiatan budidaya tanaman tahunan/ perkebunan di wilayah Kabupaten Pinrang diarahkan pada beberapa kawasan potensial pengembangan komoditi tanaman tahunan seperti Kakao, Kopi Robusta, Kopi Arabica, Kelapa Hibrida, Kelapa sawit, Jambu Mete, jarak dan Kemiri.

Luas areal yang diarahkan untuk pengembangan tanaman perkebunan adalah seluas 24.417 ha, dengan jenis komoditi unggulan wilayah berupa Kakao yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan, dan Kopi Robusta yang potensial dikembangkan di wilayah Kecamatan Lembang. Komoditi perkebunan lainnya yang banyak dibudidayakan di wilayah Kabupaten Pinrang terdiri atas : Kopi Arabica, Kelapa Hibrida, Kelapa Dalam, Jambu Mete, dan Kemiri. Untuk kegiatan perkebunan yang intensif diarahkan pada kawasan dengan ketinggian 200 – 400 m dpl, sementara untuk kegiatan perkebunan yang non intensif diarahkan pada areal dengan ketinggian > 400 m dpl

c. Kawasan Perikanan

Rencana pengembangan kegiatan perikanan di wilayah Kabupaten Pinrang dapat dikluster berdasarkan jenis kegiatannya yaitu :

- 1) budidaya laut,
- 2) budidaya payau, dan

3) budidaya air tawar.

Arahan pengembangan komoditas perikanan mencakup :

1. komoditas perikanan budidaya payau berupa udang windu, bandeng, dan kepiting bakau,
2. komoditas perikanan budidaya laut berupa rumput laut, kerapu, dan sejenisnya, dan
3. komoditas budidaya air tawar berupa ikan karper, ikan mas, dan ikan nila. Pertimbangan arahan pengembangan kegiatan budidaya tersebut didasarkan atas nilai ekonomis yang tinggi dan telah berkembang dimasyarakat, serta pangsa pasarnya cukup prospek.

Dengan mempertimbangkan karakteristik kawasan yang sesuai untuk pengembangan budidaya payau di Kabupaten Pinrang, maka sebarannya lebih diarahkan di wilayah Kecamatan Duampanua, Kecamatan Mattiro Sompe, Kecamatan Cempa, Kecamatan Suppa, Kecamatan Lanrisang, dan Kecamatan Lembang dengan total areal seluas ± 13.559 ha. Jenis komoditi perikanan budidaya payau unggulan wilayah Kabupaten Pinrang berupa Udang, Ikan Bandeng dan rumput laut.

Sementara untuk kegiatan budidaya laut akan memanfaatkan perairan Selat Makassar yang membentang dari selatan sampai barat

kearah laut lepas sejauh menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Pinrang. Untuk kegiatan budidaya air tawar di Kabupaten Pinrang lebih diarahkan pada kawasan yang sesuai dengan karakteristik kegiatan budidaya tersebut, terutama persediaan air tawar yang cukup dengan luas areal kolam keseluruhan 1.364 ha yang tersebar hampir merata di seluruh wilayah kecamatan.

d. Kawasan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata memiliki fungsi utama antara lain :

- 1) memperkenalkan, mendayagunakan, dan melestarikan nilai-nilai sejarah/budaya lokal dan keindahan alam,
- 2) mendukung upaya penyediaan lapangan kerja yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di wilayah dimana obyek wisata tersebut berada. Jenis obyek wisata yang diusahakan dan dikembangkan dikawasan peruntukan pariwisata dapat berupa wisata alam ataupun wisata sejarah dan konservasi budaya. Dalam UU/9/1990 tentang Kepariwisataan disebutkan bahwa pengusaha obyek dan daya tarik wisata budaya merupakan usaha pemanfaatan seni bangsa untuk dijadikan sasaran wisata. Pengembangan pariwisata di suatu daerah harus direncanakan dan dikembangkan secara ramah lingkungan dengan tidak menghabiskan atau merusak sumber daya alam dan sosial, namun dipertahankan untuk pemanfaatan yang berkelanjutan. Di wilayah Kabupaten Pinrang

kegiatan kepariwisataan merupakan salah satu sektor yang perlu digenjot pertumbuhannya melalui pengembangan kawasan obyek wisata, mengingat sektor kepariwisataan akan mampu menumbuhkembangkan sektor-sektor terkait yang cukup luas (multiplier effect). Adapun rencana pengembangan sektor kepariwisataan di wilayah Kabupaten Pinrang terdiri atas pariwisata budaya, pariwisata alam, dan pariwisata buatan.

4.1.8 Wilayah Rawan Bencana

-Potensi Banjir

Pinrang adalah salah satu daerah rawan banjir di Sulawesi Selatan, Berdasarkan peta rawan banjir, daerah rawan banjir di Pinrang terdapat di kecamatan Duampanua dan Kecamatan Suppa. Hal tersebut disebabkan oleh posisi geografis Pesisir Kabupaten Pinrang yang berada pada hilir DAS Sungai Saddang.

Genangan air (banjir) yang terjadi secara alami di wilayah daerah aliran sungai (DAS) pada dasarnya tidak menjadi permasalahan, seandainya wilayah tersebut belum dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tetapi, jika wilayah DAS telah dimanfaatkan oleh manusia, seperti penggunaan lahan untuk pertanian dan pertambakan, lahan permukiman dan kegiatan-kegiatan peruntukan lainnya, maka genangan tersebut dianggap merugikan dan mengancam kehidupan.

Bencana alam geologi yang rutin terjadi di Kabupaten Pinrang adalah banjir di Desa Katemporang, Paria, Bababinanga dan Salipolo Kecamatan Cempa dan tanah longsor sepanjang jalan dari Kampung Lome sampai dengan Kampung Batri dengan jarak kurang lebih 250 meter. Daerah ini merupakan daerah yang sangat relatif rendah dan menjadi jalur pembuangan air dari sungai saddang saat ini air meluap khususnya pada musim hujan lebat.

-Longsor

Tanah longsor pada umumnya terjadi di daerah pegunungan seperti daerah lemosusu, Karawa, dan Bakaru. Tanah longsor di Kabupaten Pinrang terjadi karena adanya kontrol topografi yang sangat curam, pengaruh emiringan lereng, adanya jenis batuan yang mudah lapuk (Tufa Breksi Vulkanik), tingkat pelapukan tinggi, jalur struktur geologi, hujan lebat dan struktur manusia.

-Abrasi dan Sedimentasi Pantai

Wilayah pesisir Pinrang pada umumnya memiliki karakteristik material lempung berpasir. Jenis material tersebut sangat rentang terbawa oleh aktivitas gelombang dan arus laut. Secara sederhana proses pantai disebabkan oleh angin dan air yang bergerak dari suatu tempat ke tempat lain, mengikis tanah dan kemudian mengendapkannya di suatu tempat

secara kontinu. Proses pergerakan gelombang datang pada pantai secara esensial berupa osilasi. Angin yang menuju ke pantai secara bersamaan gerak gelombang yang menuju pantai berpasir secara tidak langsung mengakibatkan pergesekan antara gelombang dan dasar laut, sehingga terjadi gelombang pecah dan membentuk turbulensi yang kemudian membawa material disekitar pantai termasuk yang mengakibatkan pengikisan pada daerah pantai (erosi).

Tabel 4.4
Lokasi Rawan Abrasi dan Sedimentasi

Abrasi dan Sedimentasi		Keterangan
Kecamatan Suppa	Desa Lero & Desa Tasiwalie	Sekitar Muara Sungai
Kecamatan Lanrisang	Dusun Jampue & Desa WaetuwoE	
Kecamatan Mattirosompe	Kel. Langnga & Kel. Pallam eang	

Sumber : Hasil Survey Tahun 2010

4.1.9. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Pinrang 351.300 jiwa pada Tahun 2013 (Data BPS 2013), terdiri dari laki-laki sebanyak 175.100 jiwa (48,47 %) dan perempuan sebanyak 186.200 jiwa (51,53 %). Jumlah ini meningkat 0,35 % dibandingkan Tahun 2012, di mana pada Tahun 2012 jumlah penduduk Kabupaten Pinrang mencapai lk 360.019 jiwa, terdiri atas : laki-laki 174.667 jiwa (48,52 %) dan perempuan 185.352 jiwa (51,48 %). Jika dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur pada Tahun 2012, jumlah penduduk kelompok umur produktif (15-64 Tahun) mencapai 62,91 %, jumlah penduduk kelompok umur muda (0-14 Tahun) mencapai 37,09 % dan jumlah penduduk kelompok umur tua (65 Tahun ke atas) mencapai 5,35 %.

Tabel 4.5
Jumlah Penduduk Kabupaten Pinrang

No	Kelompok Umur(thn)	2011				2012			
		Jenis Kelamin		Jumlah	%	Jenis Kelamin		Jumlah	%
		Laki-laki	Perempuan			Laki-Laki	Perempuan		
1	Muda (0-14)	58.830	55.981	114.811	32,37	58.830	55.981	114.811	32,37
2	Produktif (15-64)	104.055	104.779	217.996	61,47	104.055	104.779	217.996	61,47
3	Tua (65+)	9.162	21.845	21.845	6,16	9.162	21.845	21.845	6,16
Jumlah		171.272	172.047	182.605	354.652	100	182.605	354.652	100
%									
LPP (%)				0,36					0,36
Dependency Ratio (%)				69,82					69,82
Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)				181					181

Sumber : BPS Kabupaten Pinrang Tahun 2011 – 2012

Dari jumlah penduduk tersebut di atas, terdapat angka beban ketergantungan (dependency ratio) sebesar 62,09 %, ini artinya pada setiap 100 penduduk produktif harus menanggung lk. 63 orang penduduk tidak produktif. Jika dibandingkan dengan tahun 2011, dependency ratio pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 6,92 poin, sedangkan dependency ratio pada tahun 2011 sebesar 69,82 %. Angka Ketergantungan (dependency ratio) diharapkan dapat diturunkan pada tahun-tahun mendatang, dengan meningkatkan Daya saing dan Sumber Daya Manusia Masyarakat Kabupaten Pinrang.

Secara perbandingan wilayah, Kabupaten Pinrang memiliki potensi wilayah yang luas mencapai 196.177 ha atau 1961,77 km², sehingga rata-rata kepadatan penduduknya adalah 184 jiwa/km². Artinya secara rata-rata terdapat 184 orang yang menghuni 1 km² daerah. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kepadatan penduduk Tahun 2011 meningkat sebesar 3 jiwa/km², sedangkan kepadatan penduduk Tahun 2010 mencapai 180 jiwa/km². Kenaikan setiap tahun bertambah seiring dengan pertambahan penduduk setiap tahun, sedangkan jumlah lahan tidak berubah. Jika dilihat per wilayah, urutan 3 terbanyak jumlah penduduk paling banyak yang tercatat berada di Kecamatan Watang Sawitto, Kecamatan Duampanua, dan Kecamatan Paleteang, sedangkan jumlah penduduk terkecil yang tercatat berada di Kecamatan Batulappa. Namun jika dilihat dari kepadatan penduduk suatu wilayah (jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayah daerah masing-masing), maka Kecamatan

Paleteang dan Watang Sawitto menjadi kecamatan yang paling padat di Kabupaten Pinrang, sedangkan kecamatan dengan kepadatan paling rendah diduduki oleh Kecamatan Batulappa dan Kecamatan Lembang.

Berikut jumlah dan kepadatan penduduk per kecamatan pada tahun 2011 di Kabupaten Pinrang.

Tabel 4.6
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Luas Wilayah (Ha)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha)
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
1	Suppa	14.861	15.848	30.709	74,20	414
2	Mattiro Sompe	13.226	14.176	27.402	96,99	283
3	Lanrisang	8.091	8.993	17.084	73,01	234
4	Mattiro Bulu	12.995	14.003	26.998	132,49	204
5	Watang Sawitto	25.757	26.881	52.638	58,97	893
6	Paleteang	18.598	19.323	37.921	37,29	1.017
7	Tiroang	10.360	10.800	21.160	77,73	272
8	Patampanua	15.349	16.330	31.679	136,85	231
9	Cempa	8.391	8.912	17.303	90,30	192
10	Duampanua	21.124	22.758	43.882	291,86	150
12	Batulappa	4.712	4.962	9.674	158,99	61
13	Lembang	18.583	19.619	38.202	733,09	52
Jumlah		172.047	182.605	354.652	1.961,77	181

Sumber : BPS Kabupaten Pinrang Tahun 2012

Adapun terkait Akta Kelahiran maka dapat dilihat dari data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengenai Jumlah anak usia 0-18 Tahun serta data kepemilikan Akta Kelahirannya sebagai berikut :

TABEL 4.7
KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN ANAK USIA 0-18 TAHUN
PER-JULI 2017

No	Kecamatan	Jumlah Anak 0-18 Tahun	Jumlah Anak Memiliki Akta	Jumlah Anak Belum Memiliki Akta
1	Mattiro Sompe	10.164	8.786	1.378
2	Suppa	11.357	9.837	1.520
3	Mattiro Bulu	10.152	8.941	1.211
4	Watang Sawitto	19.727	16.375	3.352
5	Patampanua	13.651	11.943	1.708
6	Duampanua	17.918	14.121	3.797
7	Lembang	18.158	15.254	2.904
8	Cempa	6.985	6.270	715
9	Tiroang	8.142	7.359	783
10	Lanrisang	6.625	5.829	796
11	Paletang	15.217	12.538	2.679
12	Batu Lappa	4.636	3.997	639
Jumlah		142.732	121.250	21.482

4.1.10 Visi dan Misi Kabupaten Pinrang

Visi merupakan wujud atau bentuk masa depan yang diharapkan. Rumusan visi mencerminkan kebutuhan yang fundamental dan sekaligus merefleksikan dinamika pembangunan dari berbagai aspek. Visi Kabupaten Pinrang, yaitu "Terwujudnya masyarakat sejahtera melalui penataan program pembangunan pro rakyat menuju terciptanya kawasan agropolitan yang didukung oleh penerapan prinsip-prinsip tata kelola

pemerintah” Visi tersebut dijabarkan dalam misi Kabupaten Pinrang sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah yang professional.
- 2) Mengoptimalkan pemanfaatan dan pelestarian SDA yang berwawasan lingkungan dan memperkuat agribisnis dan agroindustri.
- 3) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memperkuat kemandirian lokal.
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
- 5) Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana serta infrastruktur terutama pada sektor pertanian.
- 6) Meningkatkan pengamalan dan nilai-nilai keagamaan pancasila dan budaya lokal.
- 7) Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum

4.2. Profil Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pinrang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang No 56 Tahun 2016 tentang Organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pinrang. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yaitu Drs. H. Aswadi Haruna,

M.Sc, MM dan Kantor Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
beralamat di Jl. Bintang Pinrang

4.2.1. Tugas Pokok Fungsi dan Struktur Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pinrang

4.2.1.1. Tugas Pokok

Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di Bidang Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam rangka kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi yang meliputi fungsi: perumusan kebijakan teknis, pengelola unit pelaksana teknis daerah, pengelola urusan ketatausahaan, pembinaan teknis operasional, pembinaan staf, pemberian pelayanan umum serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati.

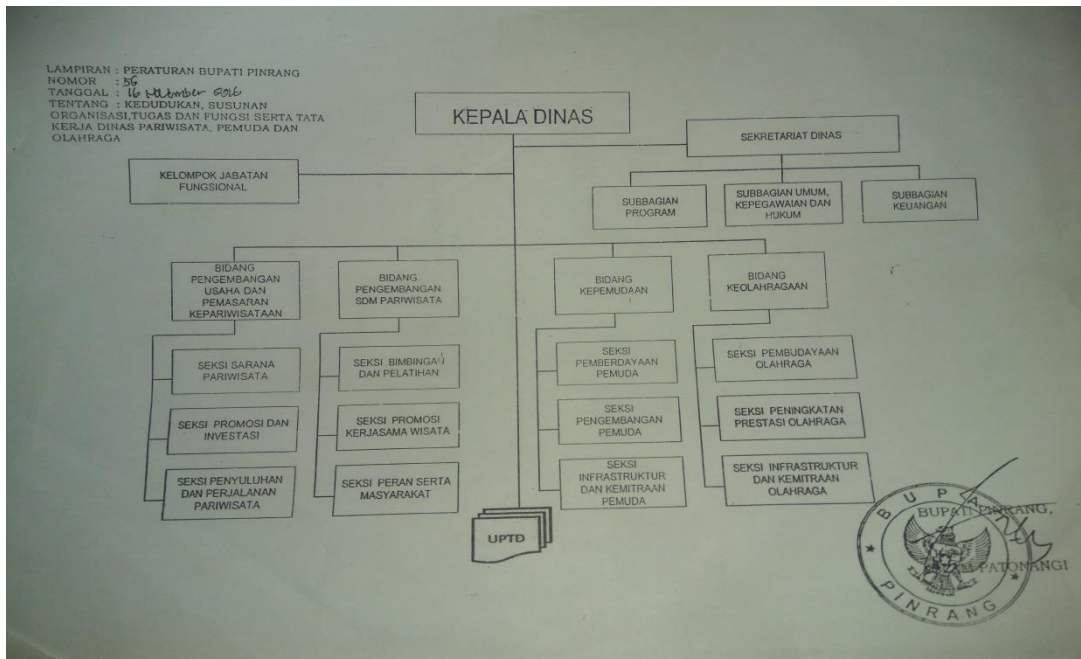
4.2.1.2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas mempunyai Fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan program kerjapariwisata, pemuda dan olahraga yang meliputi bidang pariwisatakepemudaan,dan olahraga
- b. Perencanaanmeliputi perumusan rencana dan program kerja di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga .

- c. Pelaksana penetapan kebijakan operasional kepemudaa dan olahraga kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pembinaan administrasi yang meliputi pembinaan administrasi keuangan dan pelaporan, pembinaan administrasi hukum dan kepegawaian, pembinaan administrasi umum dan perlengkapan;
- e. Pelaksanaan pengawasan kegiatan, keuangan, ketatalaksanaan, alat-alat perlengkapan, pembangunan, dan tenaga teknis
- f. Pelaksana penyediaan sistem informasi manajemen pembinaan kabupaten Pinrang
- g. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga.
- h. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan UPTD Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga.
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati;

4.2.1.2. Struktur DISPASPOR



4.2.2. Visi dan Misi

4.2.2.1. Visi

Visi merupakan pandangan kedepan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dandiarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Dengan mengacu pada pemikiran tersebut, visi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pinrang adalah: ***"Pariwisata ,Pemuda dan olahraga Pinrang lebih baik dan berdaya saing tinggi."*** Secara ringkas, visi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pinrang tersebut dapat diartikan sebagai berikut:

- A. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan pelaksana urusan di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga, memiliki komitmen kuat meningkatkan profesionalisme sumberdaya manusia di bidang pariwisata, kepemudaan dan keolahragaan dan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.
- B. Komitmen tersebut dapat dicapai apabila Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pinrang mampu mewujudkan citra kelembagaan dan tata kelola dinas / SKPD yang lebih baik dan profesional.

4.2.2.2. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Sebagai penjabaran visi tersebut, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (DISPASPOR) menetapkan misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan citra kelembagaan dan tata kelola Dispaspur yang bersih dan profesional;
- b. Meningkatkan kemampuan pemuda melalui penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan;
- c. Meningkatkan kewirausahaan pemuda yang inovatif, kreatif dan produktif;

- d. Melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional;
- e. Menghasilkan tenaga-tenaga olahraga yang handal melalui pembinaan dan pengembangan secara terpadu, berjenjang dan sistematis;
- f. Mengangkat Pariwisata daerah dan dikenal di tingkat nasional maupun internasional;
- g. Membangun prasarana pariwisata yang memadai dan menumbuhkan lapangan kerja.

4.2.3. Tupoksi Struktur Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

4.2.3.1. Tugas dan Fungsi Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

a. Fungsi Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pariwisata pemuda dan olahraga.

b. Tugas Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga seperti berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dan strategis dibidang pariwisata, pemuda dan olahraga.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pariwisata, pemuda dan olahraga.

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pariwisata, pemuda dan olahraga.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya

4.2.3.2. Tugas dan Fungsi Sekretariat.

1. Fungsi Sekretariat

Sekretariat berfungsi membantu kepala dinas dalam melaksanakan kordinasi kegiatan, menyelenggarakan urusan atministrasi umum, perlengkapan, kerumah tanggaan, kelembagaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan dan program.

b. Tugassekretariat :

Tugas sekretariat Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut:

1. Mengelola administrasi dan urusan umum ;
2. Pelaksanaan urusan kerumah tanggaan dan perlengkapan;
3. Pelaksanaan urusan Organisasi, tatalaksana dan kehumasan;
4. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
5. Pelaksanaan urusan keuangan;
6. Pelaksanaan urusan program;
7. Pelayanan teknis administrasi kepada Kepala Dinas dan semua satuan unit kerja di lingkungan Dinas;

8. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP);
9. Melaksanakan survey kepuasan masyarakat;
10. Melaksanakan fungsi pejabat pengelola informasi dokumentasi dalam lingkup dinas;
11. Menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dan menyiapkan data atau bahan pemecahan masalah sesuai dengan fungsinya;
12. Menilai Prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
13. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinassesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sendiri memiliki 3 subbagian yang bertugas membantu kepala sekretaris serta menjalankan tugasnya masing-masing yakni;

1. Subbagian Program;
2. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum;
3. Subbagian Keuangan.

4.2.3.3. Tugas dan Fungsi Bidang Pariwisata .

a. Tugas Bidang Pariwisata

Bidang Pariwisata mempunyai tugas sbagai berikut:

1. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja serta penyelenggaraan tugas bidang pengembangan usaha dan pemasaran kepariwisataan;

2. Menyusun serta melaksanakan SOP sesuai rincian tugas dan mengevaluasi hasil SOP;
3. Mengatur dan mengkoordinasikan tugas bawahannya;
4. Pengembangan usaha pariwisata serta mengkaji dampak sosial budayanya di masyarakat;
5. Melaksanakan kegiatan penelitian dan studi banding kepariwisataan dalam rangka pengembangan pariwisata;
6. Melakukan kerjasama dengan instansi yg terkait dengan kepariwisataan;
7. Mengelola daya tarik wisata kawasan strategis, destinasi dan daftar usaha pariwisata daerah;
8. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Fungsi bidang Pariwisata

Bidang pariwisata berfungsi membantu kepala dinas dalam melaksanakan penelitian dan pengkajian serta pembinaan objek daya tarik wisata, sarana pariwisata dan upaya pengembangan pemasaran potensi pariwisata.

Bidang Pariwisata dibagi menjadi 2 bagian sesuai fungsinya dan mempunyai kepala bidang masing-masing yakni;

1. Bidang Pengembangan Usaha dan Pemasaran Kepariwisata

Bidang Pengembangan Usaha dan Pemasaran Kearifan Budaya Lokal sendiri memiliki 3 seksi yang bertugas membantu kepala bidang serta menjalankan tugasnya masing-masing yakni;

- a. Seksi Sarana Pariwisata;
- b. Seksi Promosi dan Investasi;
- c. Seksi Penyuluhan dan Perjalanan Pariwisata.

2. Bidang Pengembangan SDM Pariwisata

Bidang Pengembangan SDM Pariwisata sendiri memiliki 3 seksi yang bertugas membantu kepala bidang serta menjalankan tugasnya masing-masing yakni;

- a. Seksi bimbingan dan Pelatihan
- b. Seksi Promosi Kerjasama Wisata
- c. Seksi Peran serta Masyarakat

4.2.3.4. Tugas dan Fungsi Bidang Kepemudaan.

- a. Tugas bidang pemuda :

Kepala Bidang pemuda mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis dibidang kepemudaan, meliputi anak dan remaja, produktifitas dan lembaga kepemudaan.

b. Fungsi Bidang Pemuda :

Fungsi Bidang Pemuda Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan pedoman petunjuk teknis pemberdayaan anak, remaja, produktifitas, kewirausahaan serta lembaga kepemudaan;
2. Pemberdayaan anak, remaja, produktifitas, kewirausahaan dan lembaga kepemudaan;
3. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemberdayaan kepemudaan;
4. Pengembangan Organisasi Kepemudaan tingkat Kabupaten;
5. Melaksanakan Kegiatan pembinaan pelayanan pemuda;
6. Menghimpun bahan pedoman bantuan pemberdayaan pemuda.
7. Menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dan menyiapkan data atau bahan pemecahan masalah sesuai dengan tugas dan fungsinya;
8. Melakukan Monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas;
9. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberika oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bidang Kepemudaansendiri memiliki 3 seksi yang bertugas membantu kepala bidang serta menjalankan tugasnya masing-masing yakni;

1. Seksi Pemberdayaan Pemuda
2. Seksi Pengembangan Pemuda
3. Seksi Instruktur dan Kemitran Pemuda

4.2.3.5.Tugas dan Fungsi Bidang Olahraga

a. Tugas bidang olahraga :

Kepala bidang olahraga mempunyai tugas melaksanakan pembinaan olahraga terhadap pelajar dan mahasiswa di luar sekolah / kampus serta pembinaan olahraga masyarakat.

b. Fungsi Bidang Olahraga :

Bidang olahraga mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana kegiatan pemberdayaan olahraga bagi anak prasekolah, pelajar dan mahasiswa di luar sekolah/ kampus serta masyarakat;
2. Penyusunan pedoman pemberdayaan olahraga bagi anak prasekolah, pelajar dan mahasiswa di luar sekolah/ kampus serta masyarakat;

3. Pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan olahraga bagi anak prasekolah pelajar dan mahasiswa di luar sekolah/ kampus serta masyarakat;
4. Pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan olahraga bagi mahasiswa dan masyarakat melalui pemasalan dan pembibitan;
5. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan pengetahuan teknis bagi pelatih, wasit, official dan Pembina olahraga;
6. Pelaksanaan tugas tugas lain yang diberika oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Keolahragaan sendiri memiliki 3 seksi yang bertugas membantu kepala bidang serta menjalankn tugasnya masing-masing yakni;

1. Seksi Pemberdayaan Olahraga;
2. Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga;
3. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga.

4.3. Organisasi Kepemudaan Di Kabupaten Pinrang

Dalam penelitian yang berjudul “ ***Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Di Kabupaten Pinrang***” Penulis kemudian membatasi subjek penelitian dari organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Pinrang yakni Kerukunan Mahasiswa Pinrang Universitas Hasanuddin (KMP-UNHAS). Alasan Penulis untuk memilih KMP-UNHAS sebagai subjek penelitian adalah dikarnakan penulis

melihat bahwa KMP-UNHAS adalah Organisasi Kepemudaan yang paling aktif dan banyak berkontribusi terhadap Kabupaten Pinrang yang dapat dinilai dari banyaknya program kerja yang telah dilaksanakan yang bersifat membangun generasi muda di Kabupaten Pinrang.

4.3.1 Profil Kerukunan Mahasiswa Pinrang Universitas Hasanuddin (KMP-UNHAS)

4.3.1.1. Sejarah KMP

Kerukunan mahasiswa pinrang merupakan sebuah organisasi formal yang berbentuk organisasi kemahasiswaan ekstra kampus yang berbasis pada kedaerahan. Artinya, organisasi ini terbentuk atas dasar kedaerahan. KMP UNHAS didirikan di Makassar pada tanggal 02 Januari 1989 dan diketuai oleh sdr Arifin Sanusi dari fakultas Teknik jurusan Teknik Mesin, Angkatan 1986. Organisasi ini terbentuk berawal dari penggabungan 2 kelompok Organisasi kemahasiswaan pinrang yang berkuliah di Universitas Hasanuddin yaitu kelompok organisasi eksakta yang dinamai HIMEP (Himpunan Mahasiswa Eksakta Pinrang) dan kelompok belajar non-eksakta yang dinamai HIMISPI (Himpunan Mahasiswa Ilmu Sosial Pinrang), bergabungnya 2 kelompok organisasi tersebut, ini didasari atas dasar keinginan bersama, dan atas dasar kebutuhan akan prosaes pembelajaran, mengingat pentingnya dibentuk sebuah wadah untuk para mahasiswa dari pinrang yang berkuliah di UNHAS guna memahami proses – proses dan dinamika - dinamiaka yang terdapat di dalam sebuah organisasi.

Organisasi kemahasiswaan yang berbentuk kedaerahan dalam hal ini KMP UNHAS adalah organisasi yang menghimpun diri dalam satu ikatan/wadah yang disebut Kerukunan Mahasiswa Pinrang Universitas Hasanuddin. Disingkat KMP UNHAS. Kerukunan Mahasiswa Pinrang Universitas Hasanuddin merupakan organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan yang berlandaskan tridarma Perguruan Tinggi dan pola pembangunan daerah dan masyarakat kabupaten Pinrang. Sebagai organisasi mahasiswa pinrang di universitas hasanuddin, maka Kerukunan Mahasiswa Pinrang Universitas Hasanuddin berinteraksi dengan tiga komponen besar yakni mahasiswa unuversitas hasanuddin asal pinrang, pemerintah daerah, dan masyarakat kabupaten pinrang.Menyadari hal tersebut diatas, maka Kerukunan Mahasiswa Pinrang Universitas Hasanuddin mengembangkan amanah untuk menghimpun mahasiswa pinrang di universitas hasanuddin dan untuk berpartisipasi serta bertanggung jawab mewujudkan masyarakat adil, makmur serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. (GBHO KMP UNHAS). Berikut ini merupakan susunan nama – nama ketua umum berdasarkan periode kepengurusan yang dimulai pada periode 1998 hingga berjalannya organisasi sampai saat ini, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8

**Daftar Susunan Nama – Nama Ketua Umum Berdasarkan Periode
Kepengurusan**

NO	PERIODE	NAMA	ANG	FAKULTAS/JURUSAN
1	1989 - 1990	Arifin Sanusi	1986	Teknik Mesin
2	1990 - 1991	Zulhajji Jompa	1988	Teknik Mesin
3	1991 - 1992	Abdul Hamid	1988	Teknik Mesin
4	1992 - 1993	Faisal Ichwan Azali	1989	Pertanian
5	1993 – 1994	Ahmad Ismail	1991	FISIPOL
6	1994 - 1995	Marif Mansjur	1991	Hukum
7	1995 - 1996	Rapi Kebo	1992	Pertanian
8	1996 - 1997	Hariansyah Nurdin	1993	Hukum
9	1997 - 1998	Abdul Muhaimin Hasan	1994	FISIP / Komunikasi
10	1998 - 1999	Awaluddin Ilyas	1994	MIPA / Fisika
11	1999 - 2000	Darmawan Suddin	1995	Teknik Mesin
12	2000 - 2001	Abdul Rahman	1996	Kedokteran Umum
13	2001 – 2002	Maksar Mansjur	1998	FISIP / Sosiologi
14	2002 -	Muhammad Syukur	1999	Teknik Elektro

	2003			
15	2003 - 2004	Andi Saktiawan Bustan	2000	Teknik Elektro
16	2004 - 2005	Mukhtar	2001	FISIPOL
17	2005 - 2006	Sudirman	2002	FIKP / Kelautan
18	2006 - 2007	Suardi	2004	Kehutanan
19	2007 - 2008	Fadli	2005	MIPA / Fisika
20	2008 - 2009	Rudi Amir	2006	Teknik Geologi
21	2009 - 2010	Hamzah	2007	Teknik Perkapalan
22	2010 - 2011	Firman Mas'udi	2008	FISIP / Antropologi
23	2011 -2012	Muhammad Arif Indiarso	2009	FIKP / Perikanan
24	2012 - 2013	Arfandi A tejne	2010	FISIP / Ilmu Politik
25	2014 – 2015	Muh. Nurul Arifin	2011	FISIP / Pemerintahan
26	2015 - 2016	Idul Amir	2012	Sastra / Arab
27	2016-2017	Dayu Darmawan	2013	Ekonomi
28	2017-2018	Masdar Tahir	2015	Peternakan

Sumber: Arsip Kesekretariatan KMP UNHAS

Hingga saat ini organisasi ini telah berjalan selama kurang lebih 28 Tahun, tentu tidak kita pungkiri bahwa berjalannya organisasi ini tidak terlepas dari berbagai dinamika – dinamika ataupun masalah – masalah yang sering kita sebut dengan konflik. Selain dinamika konflik yang terjadi selama kurang lebih 26 tahun ini, KMP UNHAS juga telah menyelesaikan berbagai jenis program kerja dan KMP UNHAS telah memiliki ratusan bahkan ribuan jumlah alumni anggota organisasi.

4.3.1.2. Landasan dan Tujuan

1. Landasan

Landasan KMP-UNHAS : Kerukunan Mahasiswa Pinrang Universitas Hasanuddin (KMP-UNHAS) merupakan organisasi mahasiswa yang bersifat sosial kemasyarakatan yang berlandaskan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pola Pengembangan Daerah serta Masyarakat Kabupaten Pinrang.

2. Tujuan

Tujuan KMP UNHAS : KMP-UNHAS bertujuan Menghimpun Mahasiswa Pinrang di Universitas Hasanuddin untuk mewujudkan insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang berilmu, berbudi pekerti luhur dan bertanggung jawab atas pembangunan masyarakat Pinrang demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

4.3.1.3. Kepengurusan KMP

1. Struktur Organisasi

- a. Dewan Penasehat KMP-UNHAS: Dewan penasehat adalah unsur pimpinan atau pemerintah daerah Kabupaten Pinrang, donatur dan simpatisan Kerukunan Mahasiswa Pinrang Universitas Hasanuddin (KMP-UNHAS) yang ditunjuk oleh Pengurus Harian atas persetujuan Dewan Pertimbangan Organisasi. Yang berfungsi sebagai tempat konsultasi pengurus baik ketika ada permasalahan maupun tidak ada.
- b. Dewan Pembina KMP-UNHAS: Dewan Pembina adalah pengajar/alumni asal daerah Kabupaten Pinrang di Universitas Hasanuddin. Yang berfungsi sebagai tempat konsultasi pengurus baik ketika ada permasalahan maupun tidak ada.
- c. Dewan Pertimbangan Organisasi (DPO) KMP-UNHAS: DPO adalah badan pertimbangan dalam organisasi Kerukunan Mahasiswa Pinrang Universitas Hasanuddin (KMP-UNHAS) yang terdiri dari mahasiswa senior atau sesepuh Mahasiswa Pinrang di Universitas Hasanuddin dan/atau mereka yang telah diangkat oleh Musyawarah Anggota. Berfungsi sebagai Legislatif dan yudikatif.
- d. Pengurus Harian dan anggota KMP-UNHAS:

Pengurus harian periode 2017-2018 merupakan badan eksekutif dalam organisasi. Pengurus harian pada terdiri dari ketua umum,

sekertaris, bendahara dan membentuk 6 divisi yang dianggap sesuai dengan kebutuhan organisasi yaitu :

- Divisi pendidikan dan Pengembangan kader
- Divisi Hubungan Masyarakat dan Alumni
- Divisi Dana dan Kesekretariatan
- Divisi Minat dan Bakat
- Divisi Kerohanian

2. Struktur Organisasi



3. Program Kerja

Program kerja merupakan salah satu bentuk rangkaian didalam proses-proses keorganisasian, berikut ini merupakan rangkaian program kerja rutinitas setiap tahunnya yang ada di KMP UNHAS adalah sbagi berikut;

Tabel 4.9
Daftar Program Kerja Tahunan

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI PELAKSANAAN	SASARAN	TUJUAN	KETERANGAN
1	Sosialisasi dan Try Out	Pinrang	Pelajar SMA Kelas 3 Se-Kab. Pinrang	Persiapan SBMPTN	Setahun sekali
2	Bimbingan Test Intensif	Makassar	Pelajar SMA Kelas 3 Se-Kab. Pinrang	Persiapan SBMPTN	Setahun sekali
3	Penyambutan Warga Baru	Makassar	Mahasiswa Baru	Prekrutan Anggota	Setahun sekali
4	Back To Sekret	Makassar	Warga KMP	Mempererat Silaturahmi Antar Anggota	Setahun sekali
5	Gema Ramadhan	Pinrang	Anak Yatim	Meningkatkan Kesadaran Sosial	Setahun sekali
6	Kejuaraan Basket Antar Pelajar Se-Kab. Pinrang	Pinrang	Pelajar SMP dan SMA Se-Kab. Pinrang	Membentuk Generasi Atlit Berprestasi	Setahun sekali
7	Pekan Seni Pemuda	Pinrang	Pelajar SMP dan SMA Se-Kab. Pinrang	Menanamkan Jiwa Seni dan Melestarikan Budaya Daerah	Setahun sekali
8	Musyawahar Besar	Disesuaikan	Warga KMP	Penutupan Priode Kerja Kepengurusan	Setahun sekali
9	Musyawahar Kerja	Disesuaikan	Warga KMP	Pembentukan Priode Kerja Kepengurusan	Setahun sekali
11	Bakti Sosial (BAKSOS)	Pinrang	Masyarakat Pinrang	Meningkatkan Kesadaran Sosial	Disesuaikan
10	Program Kerja Lainnya	Disesuaikan	Disesuaikan		Disesuaikan tiap tahunnya

Sumber: Arsip Kesekretariatan KMP UNHAS

4. Hubungan Eksternal

a. Hubungan dengan pemerintah

KMP UNHAS memiliki hubungan dalam bentuk kordinasi dengan pemerintah Kabupaten Pinrang sesuai ketentuan AD ART.

b. Hubungan dengan organisasi lainnya

KMP UNHAS hanya menjalin hubungan dalam bentuk kordinasi dengan organisasi – organisasi kepemudaan lainnya, hal ini dapat dibuktikan melalui keterlibatan organisasi lainnya pada beberapa kegiatan yang ada di KMP UNHAS baik kegiatan yang berbentruk harian ataupun kegiatan yang berbentuk program kerja.

c. Hubungan dengan alumni

Hubungan antar alumni pun kerap dilakukan dalam bentuk Kordinasi, Bentuk kordinasi terhadap alumni tersebut dilakukan secara intensif dibandingkan kordinasi yang dilakukan terhadap PEMDA ataupun organisasi lainnya, hal ini disebabkan karena status alumni didalam organisasi KMP UNHAS yaitu berstatus anggota luar biasa. Selain hal tersebut, Alumni KMP UNHAS pun dapat terlibat secara pasif di dalam kegitan KMP UNHAS baik kegiatan harian ataupun kegiatan yang berbentuk program kerja.

4.3.1.4. Kesekretariatan

Organisasi Kerukunan Mahasiswa Pinrang Uniiversitas Hasanuddin (KMP UNHAS) bersekertariat di Jl. Perintis Kenerdekaan 7, BTN Asal Mula blok B8 No.10, Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Secara spesifikasi, disamping kanan dan kiri sekertariat KMP UNHAS terdapat bangunan tingkat dua permanen yang berfungsi sebagai tempat kost / pondokan, sekertariat KMP UNHAS terletak di Lantai 2 bangunan asrama KMP UNHAS. Ini berarti selain gedung tersebut berfungsi sebagai sekertariat yaitu sebagai tempat melaksanakan kerja – kerja kepengurusan dan keorganisasian, gedung tersebut juga berfungsi sebagai asrama kerukunan mahasiswa pinrang. KMP- UNHAS juga memiliki sekertariat di Kabupaten Pinrang yang digunakan apabila melaksanakan program kerja di Kabupaten pinrang yakni di JL. Bintang Depan Mesjid Raya Kabupaten Pinrang.

4.3.1.5. Keanggotaan

1. Anggota Biasa

Tabel berikut ini menjelaskan jumlah kolektif keanggotaan KMP UNHAS yang dikategorikan berdasarkan angkatan dengan jenis kelamin.

Tabel 4.10

Jumlah Akumulasi Anggota Biasa KMP UNHAS

Angkatan	JENIS KELAMIN		Jumlah
	Laki - Laki	Perempuan	
2008	2	-	2
2009	3	1	4
2010	7	3	10
2011	53	41	94
2012	76	54	130
2013	50	28	78
2014	37	43	80

Sumber: Arsip Kesekretariatan KMP UNHAS

a. Syarat Menjadi Anggota Biasa

Berikut ini merupakan syarat untuk terdaftar sebagai anggota didalan organisasi daerah KMP UNHAS atau sering kita sebut anggota biasa (anggaran dasar KMP UNHAS Periode 2016-2017, BAB VII, Pasal 14) adalah Mahasiswa Universita Hasanuddin asal Pinrang yang telah terbukti dan / atau diakui dan / atau terdaftar dan / atau telah dikukuhkan sebagai anggota Kerukunan Mahasiswa Pinrang Universitas Hasanuddin.

2. Anggota Luar Biasa

Anggota Luar Biasa adalah anggota biasa yang telah berakhir status keanggotaannya di Organisasi Kerukunan Mahasiswa Pinrang Universitas Hasanuddun atau biasa disebut dengan alumni

4.4 Peran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Dalam Pembinaan, Pendanaan Dan Pengawasan Organisasi Kepemudaan Di Kabupaten Pinrang

Organisasi kepemudaan tidak diragukan lagi memiliki peranan strategis bagi Bangsa dan Negara, disamping sebagai wadah pengembangan potensi generasi muda, organisasi kepemudaan juga menjadi mitra yang baik bagi pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan daerah maupun nasional. Sejalan dengan berdirinya organisasi kepemudaan di berbagai daerah di Indonesia tentu tidak lepas dari namanya masalah internal maupun eksternal. Banyak dari organisasi kepemudaan di daerah-daerah di Indonesia tidak mampu menghadang masalah-masalah yang terjadi sehingga tidak sedikit organisasi kepemudaan yang ada di daerah-daerah di Indonesia terhenti dan tidak dapat lagi menjalankan apa dari tujuan organisasi tersebut.

Maka dari itu, peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam mengatasi masalah-masalah yang ada tentang organisasi kepemudaan dan memberdayakan organisasi kepemudaan yang ada agar nantinya

dapat menghasilkan pemuda yang berprestasi dan berguna bagi pembangunan daerah, Bangsa dan Negara.

4.4.1. Pembinaan

Pemerintah daerah merupakan pemegang kendali berbagai potensi daerah yang kemudian dipresentasikan di tingkat pusat. Sebagai pemegang kendali atas peningkatan prestasi generasi muda, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sangat diharapkan dapat berperan dalam memfasilitasi dan membina organisasi kepemudaan yang mana merupakan sebuah wadah yang penting untuk mengasah pemikiran dan peningkatan prestasi generasi muda. Sebagaimana ditegaskan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan yakni:

“Pasal 9 dan 13 ditegaskan bahwa pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bersinergi dalam pelayanan kepemudaan dalam upaya pemberdayaan. Pasal 7 disebutkan pelayanan kepemudaan di arahkan untuk menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan pada Pasal 8, disebutkan bahwa strategi pelayanan kepemudaan adalah bela negara; kompetisi dan apresiasi pemuda; peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki; dan pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda; pendampingan pemuda; perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan; dan penyiapan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya”.

Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan bapak Drs. H. Aswadi Haruna, M.Sc, MM selaku kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga bahwa:

“Peranan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sangat penting khususnya terhadap tingkat pemuda dan pelajar yang merupakan pemegang tongkat estafet kepemimpinan dimasa yang akan datang. Kami selaku pemerintah daerah telah merancang program pembinaan generasi muda dan bekerja sama dengan beberapa organisasi atau komunitas-komunitas pemuda yang ada untuk meningkatkan kualitas generasi muda yang dimana nantinya dapat berguna bagi Kabupaten Pinrang”(wawancara tanggal 19 Oktober 2017).

Hal ini juga sebada yang disampaikan oleh kepala Bidang Kepemudaan Dispaspor Kabupaten Pinrang bapak H.A. Nurdin, S.Sos bahwa:

“Dalam Membina generasi muda saya rasa pemerintah daerah dalam hal ini Dispaspor memegang peranan penting. Kami sebagai pemerintah daerah telah merancang program sebagai upaya untuk membentuk karakter kepemimpinan pemuda di Kabupaten Pinrang seperti contohnya pelatihan kewirausahaan yang pelaksanaannya melibatkan organisasi-organisasi kepemudaan yang ada dengan harapan menumbuhkan minat dan jiwa wirausawan” (wawancara tanggal 20 oktober 2017).

Minat pemuda dalam berorganisasi diberbagai daerah di Sulawesi Selatan khususnya di Kabupaten Pinrang tumbuh pesat. Tentu hal ini dibuktikan dari banyaknya organisasi-organisasi kepemudaan yang berdiri di Kabupaten Pinrang dan bergerak di berbagai sektor. Dinas Pariwisata

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pinrang mencatat ada lebih dari 40 organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Pinrang.

Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan Saudara Masdar Tahir selaku Ketua Umum KMP-UNHAS priode 2016-2017 bahwa:

“Minat pemuda dalam berorganisasi di Kabupaten Pinrang sangat besar, hal ini dapat dilihat dari banyaknya organisasi-organisasi pemudaan yang berdiri di berbagai sektor. Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan keberadaan organisasi-organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Pinrang yang dimana dirasa sangat perlu untuk diberdayakan. Pemerintah daerah harus fasilitasi dan memberikan apa yang menjadi kebutuhan dari organisasi kepemudaan yang ada agar nantinya dapat menghasilkan kader-kader berprestasi dan berguna bagi pembangunan di daerah Kabupaten Pinrang” (wawancara tanggal 15 Oktober 2017)

Tabel 4.11

Instrumen Pendataan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP)

Kabupaten Pinrang 2017

No	Nama Organisasi	Alamat
1	DPD AMPI	Jl. Bau Massepe No. 24
2	DPD AMII	Jl. Dr. WS. Husodo No. 67
3	PC1917 GM FKKPI	Jl. Rappang Komp. DIM 1404
4	KNPI	Jl.Sultan Hasanuddin
5	BAKORDA FOKUSMAKER	Jl. Kandeia Lr. 3
6	DPD IPTI	Jl. Sawitto Lerang-lerang
7	GEMA MKRG	Jl. Pattimura No. 2A
8	DPD BKPRMI	Jl. Imam Bonjol No. 35

9	PC. GP. ANSHOR	Jl. Bulu Pakoro No. 429
10	PD. PEMUDA MUHAMMADIYAH	Jl. S. Hasanuddin No. 174
11	PC. HMI	Jl. Andris Wahani No. 16
12	BPD HIPMI	Jl. Jend Sudirman
13	PC. IMM	Jl. Sultan Hasanuddin No. 174
14	DEPICAB WIRAKARYA	Jl. Kande
15	PD. NASYIATUL AISYAH	Jl. S. Hasanuddin No. 174
16	PC FATAYAH NU	Jl. Bulu Pakoro No. 429
17	PC. IPNU	Jl. Poros Polmas
18	KMP-UNHAS	BTN Asal Mula Makassar
19	KMP-UMI	Makassar
20	KMP-UIN	Makassar
21	KMP-PNUP	Makassar
22	KMP-UNM	Makassar
23	KMP- Stimik DP	Makassar
24	Corat- Coret	Jl. Sultan Hasanuddin
25	PC. IPPNU	Jl. Poros Polmas
26	PD. IRM	Jl. S. Hasanuddin No. 174
27	DPD GEMA KOSGORO	Jl. Bau Massepe No. 10
28	DPD BM KOSGORO	Jl. Bau Massepe No. 10
29	PD. PEMUDA PANCAMARGA	Jl. Bau Massepe No. 10
30	DPC. HPPI	Jl. Ir. Juanda
31	PD. BM. PAN	Jl. Ir. Juanda

32	DPD GAMKI	Jl. S. Hasanuddin No. 174
33	GARDA KEADILAN	Jl. Jend Sudirman
34	SAPMA PEMUDA PANCASILA	Jl. Terminal Lasinrang
35	SRIKANDI PEMUDA PANCASILA	Jl. Terminal Lasinrang
36	DPD PEMUDA BULAN BINTANG	Jl. Jend Sudirman
37	DPD INSAN MUDA DEMOKRAT	Amasssangen
38	DPC ANGKATAN MUDA KABAH	BTN Carawali
39	PC. GERAKAN PEMUDA KABAH	BTN Pepabri
40	BANTENG MUDA INDONESIA	Jl. Rappang
41	PEMUDA PDK	Jl. Soekawati
42	PC. PEMUDA ISLAM	Jl. Jend Sudirman
43	GARDA MUDA MERAH PUTIH	BTN Carawali Blok. C1
44	DPC GPPI	Jl. Benteng
45	AMK	Jl. A. Wahani
46	SANGGAR SENI LASINRANG	Jl. Mayjen Sutoyo
47	FORUM ANAK	Kantor BKKBN

Sumber: Arsip Dspaspor Kab. Pinrang

Dari sekian banyaknya organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Pinrang tentu saja pasti ada masalah-masalah internal maupun eksternal yang tidak dapat diatasi sendiri oleh setiap organisasi-organisasi kepemudaan yang ada. Hal ini tentu menjadi tugas penting pemerintah daerah untuk mencari cara bagaimana membina dan menyelesaikan

masalah-masalah dari organisasi kepemudaan yang ada sehingga nantinya dapat melahirkan kader-kader generasi muda yang berprestasi.

Sesuai dengan program kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga kabupaten Pinrang maka Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga di bidang Kepemudaan memiliki program kerja sebagai berikut :

Tabel 4.12

Program Bidang Kepemudaan DISPASPOS Tahun 2017 :
<p>1. Program Pelatihan Kewirausahaan</p> <ul style="list-style-type: none">• Tujuan:<ul style="list-style-type: none">a. Agar memiliki kompetensi kewirausahaan dan bisnis usia muda;b. Melatih wirausahawanagar mampu bertindak mendirikan usaha yang layak dengan memanfaatkan peluang yang ada pada saat tertentu dan di daerah tertentu;c. Mengembangkan SDM yang mampu menciptakan kesempatan kerja bagi dirinya sendiri maupun orang lain;d. Memberi motivasipeserta agar dapat meningkatkan prestasinya dalam melakukan studi, mempersiapkan proposal rencana usahanya dan berprestasi dihadapan pihak berkepentingan.• Sasaran:

<ul style="list-style-type: none"> a. Wirausahawan muda pemula yang berada pada tahap memulai usaha; b. Pemuda pengangguran yang sampai saat ini belum memiliki pekerjaan;
<p>2. Logo Dan Maskot PORDA Kabupaten Pinrang 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tujuan: <ul style="list-style-type: none"> a. Mengajak pemuda untuk berkreasi dan berimajinasi dalam membuat logo dan maskot porda pinrang 2018 yang akan datang; b. Meningkatkan kreatifitas visual generasi muda • Sasaran: <ul style="list-style-type: none"> a. Seluruh Pemuda di Kabupaten Pinrang usia 15-30
<p>3. Paskibra 17 Agustus 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tujuan: <ul style="list-style-type: none"> a. Menghimpun dan membina para anggota agar menjadi siswa-siswi dan warga Negara Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, setia dan patuh pada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi Pandu Ibu Pertiwi; b. Mengamalkan dan mengamankan Pancasila c. Membina watak, kemandirian dan profesionalisme, memelihara dan meningkatkan rasa persaudaraan,

- kekeluargaan, persatuan dan kesatuan, serta memupuk rasa tanggung jawab terhadap anggota dan keluarhanya
- d. Membentuk Pemuda Indonesia yang bermental tangguh.
- Sasaran
 - a. Siswa-siswi SMA dan sederajat.

Sumber: Dispaspor Kab. Pinrang.

Sesuai data yang diperoleh dilapangan, Penulis dapat melihat bahwa Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap organisasi kepemudaan di Kabupaten Pinrang dirasa kurang berkesinambungan jika dilihat dari program apa yang telah dirancang oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah dalam hal ini Dispaspor tidak merancang program untuk pembinaan organisasi kepemudaan secara khusus atau program yang ditujukan khusus untuk kebutuhan peningkatan kualitas organisasi kepemudaan yang ada sehingga banyak organisasi kepemudaan merasa tidak dipedulikan dan kecewa oleh pemerintah daerah.

Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan Saudara Masdar Tahir selaku Ketua Umum KMP-UNHAS priode 2016-2017 bahwa:

“Sikap pemerintah daerah terhadap seluruh element organisasi di Kabupaten Pinrang dari dulu hingga saat ini hanya menimbulkan kekecewaan. Kami biasa mengadakan ‘tudang sipulung’ antar sesama pengurus organisasi kepemudaan di Pinrang untuk membahas masalah keorganisasian di Kabupaten Pinrang dan saya mendapati keluhan yang sama dari setiap organisasi kepemudaan yang ada yakni ketidak pedulian pemerintah daerah terhadap

organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Pinrang”
(wawancara tanggal 15 Oktober 2017)

Selama ini pemerintah daerah memang telah menjalankan program untuk peningkatan generasi muda dengan mengajak organisasi-organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Pinrang untuk bekerja sama dalam hal pelaksanaannya seperti contohnya pelatihan kewirausahaan. Program yang dirancang pemerintah daerah seperti pelatihan wirausaha memang dapat dikatakan bagus karena bertujuan untuk meningkatkan minat berwirausaha, akan tetapi secara garis besar bukan itu yang menjadi kebutuhan organisasi kepemudaan di Kabupaten Pinrang saat ini, yang dibutuhkan organisasi kepemudaan di Kabupaten Pinrang sekarang ini adalah peran fungsi pemerintah daerah dalam hal kemajuan literasi dan berwacana. Kemauan pemuda dalam hal berliterasi dan berwacana yang membahas banyak hal tentang masalah dan perkembangan di Kabupaten Pinrang sangat besar.

Hal ini seperti apa yang diungkapkan oleh Saudara Dayu Darmawan selaku DPO KMP-UNHAS serta anggota PC.HMI Kabupaten Pinrang bahwa:

“Program kerja yang dirancang pemerintah daerah untuk meningkatkan generasi muda sampai saat ini memang bagus jika dilihat dari tujuannya, namun pemerintah daerah dalam hal ini Dispaspor juga harus memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan dari organisasi kepemudaan yang ada. Sekarang ini kebutuhan organisasi Kepemudaan di Kabupaten Pinrang adalah kebutuhan akan kemajuan literasi dan berwacana untuk membahas segala masalah yang terjadi di Kabupaten Pinrang, sudah seharusnya

pemerintah mencanangkan program yang memang khusus diperuntungkan untuk kebutuhan itu ” (wawancara tanggal 15 Oktober 2017)

Salah satu bentuk ketidak pedulian pemerintah daerah dalam hal pembinaan organisasi kepemudaan juga dapat dilihat dari tidak adanya peraturan daerah yang secara khusus dibuat untuk membahas tentang organisasi kepemudaan di Kabupaten Pinrang sehingga hal ini dapat dianggap sebagai lambannya tindakan pemerintah daerah dalam hal menangani masalah organisasi kepemudaan.

Bapak Drs. H. Aswadi Haruna, M.Sc, MM selaku kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mengungkapkan bahwa:

“Untuk sekarang ini memang tidak ada peraturan daerah yang mengatur tentang organisasi kepemudaan di Kabupaten Pinrang, kami juga belum terlalu paham tentang masalah itu karena dinas kami baru terbentuk selama 1 tahun dan seluruh staf di Dispaspor adalah orang baru dari dinas yang lain dan dari bidang yang berbeda kemudian dipindahkan kesini jadi kami masih sementara mengkaji apa yang mesti di prioritaskan untuk masyarakat di Kabupaten Pinrang khususnya masalah organisasi kepemudaan”(wawancara tanggal 19 Oktober 2017).

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pinrang masih baru terbentuk sehingga masih perlu mengkaji lebih jauh mengenai organisasi kepemudaan di Kabupaten Pinrang. Hal ini tentu merupakan tugas penting bagi pemerintah daerah pada umumnya dan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga pada khususnya agar kiranya peduli dan

membentuk suatu peraturan daerah yang menangani masalah keorganisasian pemuda serta membuat program kerja khusus dalam membina organisasi-organisasi kepemudaan di Kabupaten Pinrang.

4.4.2. Pendanaan

Tidak dapat dipungkiri bahwa hal yang paling dibutuhkan setiap individu maupun kelompok tidak lepas dari namanya uang. Peranan uang sangat penting dalam suatu organisasi kepemudaan. Karena jika tidak ada uang maka otomatis kegiatan rutin organisasi pun tidak bisa terlaksana. Maka dari itu sudah menjadi tugas pemerintah daerah untuk memecahkan persoalan dana yang menjadi kendala utama dari organisasi kepemudaan.

Penyediaan fasilitas seperti pembinaan dan pendanaan organisasi kepemudaan tentu saja menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Seperti yang disebutkan dalam UU Nomor 40 tahun 2009 pasal 45 ayat 1 dan 2 yakni:

“(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi organisasi kepemudaan, organisasi kepelajaran, dan organisasi kemahasiswaan, (2) satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan wajib memfasilitasi organisasi kepelajaran dan organisasi kemahasiswaan sesuai dengan ruang lingkupnya”

Sebagai komponen dalam pemerintahan daerah Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sangat berperan dalam pengalokasian dana untuk

kemajuan prestasi pemuda di Kabupaten Pinrang. Hal ini senada yang diungkapkan Kepala DISPASPOR Kabupaten Pinrang bahwa:

“Sebagai dinas yang mengawal kegiatan Kepemudaan tentu saja ini merupakan ranah kerja yang sekaligus program kerja kami. Masalah pendanaan itu kami yang programkan, selanjutnya di masukkan dalam APBD kemudian dilaksanakan oleh DISPASPOR” (wawancara tanggal 19 Oktober 2017).

Tabel 4.13
RKA-SKPD 2017 Bidang Kepemudaan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

No	Program Kerja	Anggaran
1	Pelatihan Kewirausahaan	Rp. 29.700.000,00
2	Logo Porda	Rp. 30.300.000,00
3	Paskibraka 17 Agustus	Rp. 661.650.000,00

Sumber: RKA-SKPD 2017 Dispaspur

Sesuai pengamatan penulis dilapangan bahwa dalam hal pendanaan organisasi kepemudaan di Kabupaten Pinrang tidak beda jauh dari masalah pembinaan organisasi kepemudaan di Kabupaten Pinrang. Tidak adanya program kerja khusus yang dirancang pemerintah daerah untuk organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Pinrang sehingga dalam APBD Kabupaten Pinrang tentu tidak ada juga anggaran khusus untuk itu.

Hal ini sesuai yang disampaikan Kepala Bidang Kepemudaan Dispaspur Kabupaten Pinrang bapak H.A. Nurdin, S.Sos juga bahwa:

“Terus terang dana untuk disalurkan secara langsung untuk organisasi kepemudaan untuk tahun ini itu tidak ada karena rancangan anggaran untuk APBD 2017 sudah jadi dan dalam rancangan anggaran itu tidak ada anggaran khusus untuk organisasi kepemudaan, jadi kalau ada organisasi kepemudaan yang mengajukan proposal kami cuma menyarankan untuk dimasukkan ke BKD (Badan Keuangan Daerah) karena disana biasa ada dana hibah untuk bantuan sosial namun dananya sangat terbatas”(wawancara tanggal 20 Oktober 2017).

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan Bapak Drs. H. Aswadi Haruna, M.Sc, MM selaku kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga bahwa:

“Dana bantuan untuk kegiatan organisasi kepemudaan belum ada dalam APBD 2017 karena kami masih dinas baru dan masih terus mengkaji masalah organisasi kepemudaan. Tapi untuk APBD 2018 Insyallah kami akan mencoba berkomunikasi kepada organisasi kepemudaan yang ada untuk mengajukan proposal kegiatan yang akan mereka laksanakan di tahun 2018 dan kemudian nanti akan diajukan ke rancangan APBD 2018. ”(wawancara tanggal 19 Oktober 2017).

Saudara Masdar Tahir selaku Ketua Umum KMP-UNHAS priode 2016-2017 juga mengungkapkan bahwa:

“Tentu kami butuh dana untuk menjalankan program kerja namun ketika kami mengajukan proposal kegiatan untuk permohonan bantuan dana ke pemerintah daerah, pemerintah daerah selalu mengatakan bahwa anggaran tidak ada untuk organisasi kepemudaan. Hal ini yang kemudian menghambat kami dalam melaksanakan program kerja” (wawancara tanggal 15 Oktober 2017).

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Saudara Dayu Darmawan selaku DPO KMP-UNHAS serta anggota PC.HMI Kabupaten Pinrang bahwa:

“Dalam hal pendanaan organisasi kepemudaan oleh pemerintah daerah selama ini dirasa kurang intensif dan tidak berkesinambungan dari apa yang menjadi kebutuhan organisasi kepemudaan di Kabupaten Pinrang sehingga banyak program kerja yang dicanangkan dari organisasi-organisasi kepemudaan yang ada tidak terlaksana padahal jika dilihat dari tujuan kegiatan itu sangat dianggap perlu untuk meningkatkan kualitas generasi pemuda di Kabupaten pinrang”(wawancara tanggal 15 Oktober 2017)

Dari hasil wawancara dan pengamatan penulis dilapangan bahwa pendanaan secara khusus untuk organisasi kepemudaan belum ada dalam APBD 2017 Kabupaten pinrang. Selama ini organisasi kepemudaan di Kabupaten Pinrang mendapat dana untuk melaksanakan program kerja mereka melalui sumbangsi dari Alumni atau senior terdahulu mereka serta melalui pengalangan dana sesama anggota. Dana yang bisa dinikmati oleh organisasi kepemudaan dari pemda hanya berupa dana hibah yang jumlahnya sangat terbatas jika dibandingkan dari apa yang menjadi kebutuhan organisasi kepemudaan dirasa sangat kurang.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Saudara Masdar Tahir selaku Ketua Umum KMP-UNHAS priode 2016-2017 bahwa:

“Dalam melaksanakan program kerja, kami melakukan segala cara untuk mendapat dana. Kami biasa menelpon senior untuk meminta sumbangan, mengadakan bazar dan mengajukan proposal sponsor ke pihak swasta. Namun dalam melaksanakan program yang skala besar seperti Bimbingan Test Intensif kami sangat kesulitan dalam mengumpulkan dana sehingga mau tidak mau kegiatan itu harus

ditunda dari jadwal yang ditentukan sampai dana mencukupi” (wawancara tanggal 15 Oktober 2017).

Berdasarkan pengamatan penulis pendanaan adalah faktor penting yang menjadi kebutuhan dalam proses berjalannya organisasi kepemudaan. Apalagi dalam setiap pelaksanaan program kerja dari organisasi kepemudaan pasti membutuhkan dana yang cukup besar.

4.4.3 Pengawasan

Menurut **Sondang P. Siagian, Pengertian Pengawasan** adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Dalam rangka melakukan transformasi guna meraih perbaikan kualitas organisasi kepemudaan, perlu dilakukan pengawasan (*control*) terhadap seluruh tindakan dan akibat dari proses transformasi tersebut. Melalui pengawasan tersebut dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi secara dini. Jika kekurangan dan kesalahan diketahui lebih awal maka akan dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan dengan cepat, artinya semua permasalahan dapat diantisipasi. Dengan demikian akan menghindari terjadinya kebocoran dan pemborosan untuk membiayai hal-hal yang justru harus direvisi.

Tujuan pengawasan organisasi kepemudaan:

1. Mencegah terjadinya penyimpangan pencapaian tujuan yang telah direncanakan.
2. Agar proses kerja sesuai dengan prosedur yang telah digariskan atau ditetapkan.
3. Mencegah dan menghilangkan hambatan dan kesulitan yang akan, sedang atau mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan.
4. Mencegah penyimpangan penggunaan sumber daya.
5. Mencegah penyalahgunaan otoritas dan kedudukan.

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan Bapak Drs. H. Aswadi Haruna, M.Sc, MM selaku kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga bahwa:

“Dalam mengawasi Organisasi kepemudaan saya kira itu tentu menjadi kewajiban kami selaku pemerintah daerah. Tentu kita tidak mau melihat ada organisasi kepemudaan yang anarkis dalam bertindak dan hanya menyusahkan masyarakat. Kami berharap organisasi kepemudaan tetap berjalan pada jalur yang benar yakni peningkatan kualitas generasi muda di Kabupaten Pinrang”. (wawancara tanggal 19 Oktober 2017).

Sesuai hasil pengamatan dilapangan penulis mengetahui bahwa dalam hal pengawasan organisasi kepemudaan atau komunitas-komunitas kepemudaan di Kabupaten Pinrang, pemerintah daerah dalam hal ini Dispaspor belum dapat berjalan secara baik, dikarenakan pemerintah daerah belum berkordinasi secara maksimal kepada pengurus organisasi-organisasi kepemudaan yang ada serta masih ada organisasi kepemudaan yang berdiri di Kabupaten Pinrang tapi belum tercatat di pemda. Pemerintah daerah masih berupaya mengumpul kan seluruh data-data

terkait organisasi kepemudaan dan mencatat ulang organisasi kepemudaan yang masih berdiri atau aktif agar nantinya mudah diawasi.

Hal ini seperti yang diungkapkan Kepala Bidang Kepemudaan Dispaspor Kabupaten Pinrang bapak H.A. Nurdin, S.Sos bahwa:

“Kami selaku pemerintah daerah belum pernah berkordinasi kepada pengurus organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Pinrang sehingga kami kesusahan dalam mengawasi segala aktifitas organisasi yang ada. Insyallah kami akan berupaya mengumpulkan kembali data-data organisasi kepemudaan untuk mengetahui mana yang masih aktif dan sudah tidak aktif supaya nantinya gampang diawasi. Diawasi disini dalam artian pelaksanaan kegiatan tidak melenceng dari tujuan peningkatan prestasi pemuda” (wawancara tanggal 20 Oktober 2017).

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Saudara Masdar Tahir selaku Ketua Umum KMP-UNHAS priode 2016-2017 bahwa:

“Sejauh ini pemerintah daerah belum pernah berkordinasi dengan kami dalam hal membicarakan perkembangan organisasi. Tentu sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengetahui perkembangan organisasi kepemudaan di Kabupaten pinrang apakah sudah berjalan baik atau tidak. Jangan sampai ada organisasi kepemudaan yang berjalan tidak berada di jalur tujuannya” (wawancara tanggal 15 Oktober 2017).

Saudara Dayu Darmawan selaku DPO KMP-UNHAS serta anggota PC.HMI Kabupaten Pinrang juga menambahkan bahwa:

“Dalam hal pengawasan organisasi kepemudaan di Kabupaten Pinrang, pemerintah daerah seharusnya mengambil tindakan yang efisien yakni rutin berkordinasi dengan pengurus organisasi-organisasi kepemudaan yang ada supaya pemerintah daerah tahu apa yang harus dilakukan ketika ada organisasi-organisasi kepemudaan yang bermasalah, namun yang terjadi sekarang adalah pemerintah daerah seolah-olah tidak ada niat untuk mengetahui masalah apa yang terjadi di organisasi kepemudaan di Kabupaten Pinrang sehingga kami juga tidak tahu harus mengeluh kemana ketika ada masalah yang tidak dapat kami pecahkan

sendiri contohnya masalah keuangan serta masalah sarana dan prasarana” (wawancara tanggal 15 Oktober 2017).

Pengawasan organisasi kepemudaan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pinrang agar organisasi tersebut tetap berjalan pada tujuan untuk peningkatan Kualitas generasi muda di Kabupaten Pinrang.

4.5 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peran DISPASPOR Dalam Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Pinrang

Dalam pemberdayaan organisasi kepemudaan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dispaspur Kabupaten Pinrang tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi baik yang bersifat mendukung maupun menghambat proses dalam pemberdayaan organisasi kepemudaan di Kabupaten Pinrang sebagai . Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan organisasi kepemudaan di Kabupaten Pinrang sebagai berikut:

4.5.1. Faktor Pendukung

1. Tingginya Minat Pemuda Dalam Berorganisasi

Sebagai lembaga pemerintahan yang menangani masalah kepemudaan dalam hal ini Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Pinrang tentu memiliki rasa kebanggaan tersendiri apabila melihat pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Pinrang menghasilkan

prestasi dalam berbagai bidang. Itu semua bisa terwujud berkat adanya minat yang tinggi pemuda dalam mengasah keterampilan diri di lembaga atau organisasi serta peranan lembaga atau organisasi yang ada untuk mewadahi setiap aspirasi dan mengasah keterampilan pemuda yang ada. Tentu hal ini yang menjadi dasar pemerintah daerah dalam hal ini Dispaspor untuk terus berusaha dalam memberdayakan organisasi kepemudaan dengan harapan nantinya organisasi atau lembaga tersebut dapat menghasilkan generasi muda yang berprestasi dan dapat berguna bagi pembangunan daerah dan bangsa.

Hal ini seperti yang diungkapkan Kepala Bidang Kepemudaan Dispaspor Kabupaten Pinrang bapak H.A. Nurdin, S.Sos bahwa:

“Minat dan antusias pemuda di Kabupaten Pinrang dalam berlembaga atau brorganisasi cukup tinggi, maka dari itu kami Dispaspor akan terus bekerja sama dan berusaha membantu apa yang menjadi kebutuhan lembaga atau organisasi kepemudaan yang ada supaya nantinya lembaga atau organisasi kepemudaan akan menghasilkan kader-kader dan pemuda yang berprestasi” (wawancara tanggal 20 Oktober 2017).

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan Bapak Drs. H. Aswadi Haruna, M.Sc, MM selaku kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga bahwa:

“Yang menjadi dasar dari perhatian kami terhadap organisasi kepemudaan di Kabupaten Pinrang tentu saja adalah minat dan kemauan yang tinggi dari pemuda di Kabupaten Pinrang untuk mengasah dirinya dalam berlembaga, dari hal ini kami pemerintah daerah kedepannya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberdayakan organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Pinrang sehingga nantinya dapat menghasilkan pemuda yang berprestasi di berbagai sektor yang ada” (wawancara tanggal 19 Oktober 2017).

Saudara Masdar Tahir selaku Ketua Umum KMP-UNHAS priode 2016-2017 juga mengungkapkan bahwa:

“Kami sebagai pemuda hanya memegang teguh semangat dalam brorganisasi karena ini lah yang kami butuhkan dalam mengembangkan diri. Jadi apabila didukung oleh pemerintah daerah baik dalam hal moral maupun moril tentu saja kami akan bertambah semangat untuk terus berkreasi dalam menjalankan program kerja kami”(wawancara tanggal 15 Oktober 2017).

Jadi salah satu faktor pendukung pemerintah daerah dalam pemberdayaan organisasi kepemudaan adalah tingginya minat pemuda di Kabupaten Pinrang dalam berlembaga atau berorganisasi sehingga menjadi faktor pendorong pemerintah dalam memberdayakan organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Pinrang.

2. Semangat Bekerja Dispaspor

Sebagai dinas yang baru terbentuk selama se-tahun Dispaspor memang masih memiliki kekurangan dalam hal pemberdayaan organisasi kepemudaan, namun seluruh staf dan jajaran Dispaspor memiliki semangat yang tinggi dalam berfikir dan bekerja untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi tersebut

Hal ini sesuai yang diungkapkan Kepala Bidang Kepemudaan Dispaspor Kabupaten Pinrang bapak H.A. Nurdin, S.Sos bahwa:

“Memang untuk sekarang kami belum mampu bekerja secara maksimal dalam memberdayakan organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Pinrang dikarenakan Dispaspor baru saja terbentuk, tentu masih banyak PR yang mesti dikerjakan oleh Dispaspor dalam

hal pemberdayaan organisasi kepemudaan. Walaupun begitu, kami memiliki semangat yang tinggi dalam berfikir dan bekerja untuk memecahkan masalah organisasi kepemudaan tersebut. Kami masih akan terus mengkaji apa yang menjadi jalan keluar untuk permasalahan organisasi kepemudaan tersebut baik dalam hal pembinaan maupun pendanaan” (wawancara tanggal 19 Oktober 2017).

Hal ini juga sama yang diungkapkan Bapak Drs. H. Aswadi Haruna, M.Sc, MM selaku kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga bahwa:

“Kami adalah dinas baru tetapi kami memiliki modal dalam memecahkan masalah dibidang pariwisata kepemudaan dan olahraga, modal kami adalah semangat. Dengan terus semangat dalam bekerja mudah-mudahan kedepannya kami akan menemukan solusi dalam pemberdayaan organisasi kepemudaan ini” (wawancara tanggal 20 Oktober 2017).

Berpedoman dari uraian ini penulis bisa mengetahui bahwa salah satu faktor yang berpengaruh sebagai pendukung peranan Dispaspor dalam pemberdayaan organisasi kepemudaan di Kabupaten Pinrang saat ini adalah semangat kerja oleh seluruh staf Dispaspor dan kemauan dalam berfikir untuk memecahkan masalah organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Pinrang.

4.5.2. Faktor Penghambat

1. Merupakan Dinas Baru

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pinrang adalah dinas yang baru terbentuk selama 1 tahun, sebelumnya adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (DISPORA) kemudian dibentuk kembali

menjadi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (DISPASPOR). Tentu hal ini menjadi faktor penghambat dalam pemberdayaan organisasi kepemudaan di Kabupaten Pinrang dikarenakan staf di bidang kepemudaan yang dulu menangani masalah organisasi kepemudaan semuanya berganti dengan orang yang baru sehingga staff di bidang kepemudaan yang baru masih perlu belajar untuk menengahi masalah keorganisasiaan kepemudaan yang ada di Kabupaten Pinrang.

Hal ini sesuai yang disampaikan Bapak Drs. H. Aswadi Haruna, M.Sc, MM selaku kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga bahwa:

“Dispaspopor merupakan dinas baru, tentu saja banyak yang mesti dibenahi salah satunya adalah dalam bidang kepemudaan. Kami selaku pemerintah daerah akan gencar menengahi segala masalah kepemudaan. Tidak ada alasan pemerintah daerah untuk tidak mendukung program pembinaan kepemudaan sepanjang itu untuk kebutuhan pembangunan daerah kedepan terutama yang bergerak dalam bidang pembangunan karakter seperti organisasi kepemudaan” (wawancara tanggal 20 Oktober 2017)

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Kepala Bidang Kepemudaan Dispaspopor Kabupaten Pinrang bapak H.A. Nurdin, S.Sos bahwa:

“Faktor penghambat utama kami dalam pemberdayaan organisasi kepemudaan tentu saja karena kami masih merupakan dinas baru dan saya sebagai kepala bidang kepemudaan baru menduduki jabatan ini, tentu saja hal yang bersangkutan dengan kepemudaan merupakan hal baru buat saya pribadi serta anggota yang lain. Ini merupakan PR kami kedepannya bagaimana supaya masalah organisasi kepemudaan dapat kami atasi”. (wawancara tanggal 19 Oktober 2017)

2. Pendataan Yang Kurang Jelas

Salah satu faktor yang menghambat pemberdayaan organisasi kepemudaan di Kabupaten Pinrang oleh Dispaspor adalah masalah pendataan organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Pinrang masih belum jelas. Ada 47 organisasi kepemudaan yang tercatat di Dispaspor Kabupaten Pinrang namun masih ada organisasi-organisasi atau komunitas kepemudaan yang terbentuk tetapi belum tercatat sehingga pemerintah daerah kesulitan dalam mengawasi organisasi-organisasi tersebut. Disamping itu pemerintah daerah masih terus mencari informasi mengenai 47 organisasi kepemudaan yang tercatat untuk mengetahui keadaan organisasi tersebut apakah masih aktif atau tidak.

Hal ini seperti yang diungkapkan Kepala Bidang Kepemudaan Dispaspor Kabupaten Pinrang bapak H.A. Nurdin, S.Sos bahwa:

“Kami di bidang kepemudaan masih terus mencari informasi mengenai organisasi-organisasi kepemudaan apa yang belum tercatat di Dispaspor akan kami catat agar mudah dikordinir. Kami juga masih terus berupaya mencari informasi dan mendata ulang organisasi kepemudaan yang masih aktif dan yang sudah tidak aktif lagi di Kabupaten Pinrang sehingga nantinya dapat memudahkan kami dalam kordinasi dan memecahkan masalah yang terjadi di lembaga atau organisasi tersebut” (wawancara tanggal 19 Oktober 2017)

Senada yang disampaikan Bapak Drs. H. Aswadi Haruna, M.Sc, MM selaku kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga bahwa:

“Pendataan mengenai organisasi kepemudaan masih kurang lengkap, data yang kami peroleh dari dinas sebelumnya hanya berupa data nama organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Pinrang, itupun masih kurang lengkap. Kami juga masih kurang tahu perkembangan organisasi kepemudaan yang ada apakah masih aktif atau tidak, namun kami akan berupaya mendata ulang

organisasi-organisasi atau lembaga kepemudaan yang ada di Kabupaten Pinrang agar nantinya memudahkan dalam mengawasi.” (wawancara tanggal 20 Oktober 2017).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab IV telah diuraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang Peranan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam pemberdayaan organisasi kepemudaan di kabupaten Pinrang. Di samping itu pula dikemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi Peranan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam pemberdayaan organisasi kepemudaan. Selanjutnya dalam Bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran-saran yang berhubungan dengan hasil penelitian.

5.1. Kesimpulan

Untuk lebih jelasnya peran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam pemberdayaan organisasi kepemudaan di Kabupaten Pinrang dapat dilihat dari beberapa dimensi yaitu dalam:

a. Pembinaan

Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan organisasi kepemudaan sesuai data yang diperoleh di lapangan, Penulis dapat melihat bahwa Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap organisasi kepemudaan di Kabupaten Pinrang dirasa kurang berkesinambungan jika dilihat dari program apa yang telah dirancang oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah dalam hal ini Dispor tidak merancang program untuk pembinaan organisasi kepemudaan secara khusus atau program yang ditujukan khusus untuk kebutuhan

peningkatan kualitas organisasi kepemudaan yang ada serta tidak adanya peraturan daerah yang secara khusus dibuat untuk membahas tentang organisasi kepemudaan di Kabupaten Pinrang sehingga hal ini dapat dianggap sebagai lambannya tindakan pemerintah daerah dalam hal menangani masalah organisasi kepemudaan

b. Pendanaan

Sesuai pengamatan penulis dilapangan bahwa dalam hal pendanaan organisasi kepemudaan di Kabupaten Pinrang tidak beda jauh dari masalah pembinaan organisasi kepemudaan di Kabupaten Pinrang. Tidak adanya program kerja khusus yang dirancang pemerintah daerah untuk organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Pinrang sehingga dalam APBD 2017 Kabupaten Pinrang tentu tidak ada juga anggaran khusus untuk itu. Selama ini organisasi kepemudaan di Kabupaten Pinrang mendapat dana untuk melaksanakan program kerja mereka melalui sumbangsi dari Alumni atau senior terdahulu mereka serta melalui pengalangan dana sesama anggota. Dana yang bisa dinikmati oleh organisasi kepemudaan dari pemda hanya berupa dana hibah yang jumlahnya sangat terbatas jika dibandingkan dari apa yang menjadi kebutuhan organisasi kepemudaan dirasa sangat kurang.

c. Pengawasan

Dalam hal pengawasan organisasi kepemudaan atau komunitas-komunitas kepemudaan di Kabupaten Pinrang, pemerintah daerah dalam hal ini Dispaspor belum dapat berjalan secara baik, dikarenakan pemerintah daerah belum berkordinasi secara maksimal kepada pengurus organisasi-organisasi kepemudaan yang ada serta masih ada organisasi kepemudaan yang berdiri di Kabupaten Pinrang tapi belum tercatat di Dispaspor. Pemerintah daerah masih berupaya mengumpulkan seluruh data-data terkait organisasi kepemudaan dan mencatat ulang organisasi kepemudaan yang masih berdiri atau aktif agar nantinya mudah diawasi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi peranan pemerintah daerah dalam pemberdayaan organisasi kepemudaan di Kabupaten Pinrang terdiri dari:

a. Faktor pendukung yaitu:

1. Tingginya minat pemuda dalam berorganisasi

Minat yang tinggi pemuda dalam mengasah keterampilan diri di lembaga atau organisasi serta peranan lembaga atau organisasi yang ada untuk mewadahi setiap aspirasi dan mengasah keterampilan pemuda yang ada. Hal ini yang kemudian menjadi dasar pemerintah daerah dalam hal ini Dispaspor untuk terus berusaha dalam memberdayakan organisasi kepemudaan dengan harapan nantinya organisasi

atau lembaga tersebut dapat menghasilkan generasi muda yang berprestasi dan dapat berguna bagi pembangunan daerah dan bangsa.

2. Semangat bekerja Dispaspur

Sebagai dinas yang baru terbentuk, semangat bekerja adalah senjata yang dimiliki Dispaspur dalam memecahkan setiap masalah utamanya dibidang kepemudaan. Hal ini yang kemudian menjadi faktor pendukung Dispaspur untuk lebih memperhatikan masalah organisasi kepemudaan.

b. Faktor Penghambat

1. Merupakan dinas baru

Dispaspur adalah dinas yang baru terbentuk selama se-tahun yang sebelumnya adalah Dispora. Hal ini menjadi faktor penghambat dalam pemberdayaan organisasi kepemudaan di Kabupaten Pinrang dikarenakan staf di bidang kepemudaan yang dulu menangani masalah organisasi kepemudaan semuanya berganti dengan orang yang baru sehingga staff di bidang kepemudaan yang baru masih perlu belajar untuk menengahi masalah keorganisasiaan kepemudaan yang ada di Kabupaten Pinrang.

2. Pendataan yang kurang jelas

Salah satu faktor penghambat pemerintah daerah dalam hal ini dispaspur dalam pemberdayaan organisasi kepemudaan

adalah pendataan organisasi kepemudaan yang masih kurang jelas. Pemerintah daerah masih belum mengetahui jumlah keseluruhan organisasi kepemudaan yang ada sehingga pemerintah daerah kesulitan dalam mengawasi organisasi-organisasi tersebut. Disamping itu pemerintah daerah masih terus mencari informasi mengenai 47 organisasi kepemudaan yang tercatat untuk mengetahui keadaan organisasi tersebut apakah masih aktif atau tidak.

5.2. Saran

Dengan memperhatikan hasil penelitian terhadap peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan organisasi kepemudaan di Kabupaten Pinrang, maka disarankan kepada pihak pemerintah Kabupaten Pinrang:

1. Diharapkan pemerintah daerah Kabupaten Pinrang agar membuat peraturan daerah khusus tentang organisasi kepemudaan di Kabupaten Pinrang sehingga ada bentuk tanggung jawab pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan organisasi kepemudaan.
2. Mendorong lebih aktifnya partisipasi pemuda dalam berorganisasi di Kabupaten Pinrang.
3. Mendorong atau mensupport semua organisasi-organisasi kepemudaan yang ada untuk lebih aktif dalam menjalankan program-program kerja yang sifatnya membangun generasi muda.

4. Meningkatkan pembinaan serta kordinasi terhadap organisasi kepemudaan yang ada sehingga terjalin kerja sama yang baik dalam menghasilkan kualitas pemuda yang berprestasi.
5. Diharapkan pemerintah daerah agar mengalokasikan dana secara rutin dan jelas kepada organisasi kepemudaan yang ada di dalam APBD Kabupaten Pinrang sehingga dalam melaksanakan program kerjanya dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Anwas, Oos. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*. Yogyakarta: Penerbit Alfabeta.
- Bahri, Efri. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Dan Aplikasi*. Surabaya: FAM Publishing.
- Kum, Krinus. 2012. *Pemerintah Daerah: Memahami Konsep Implementasi*. Yogyakarta: Buku Litera.
- Siagian, [Sondang P.](#) 2012. *Teori Pengembangan Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Torang, Syamsir. 2014. *Organisasi Dan Manajemen Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi*. Yogyakarta: Media komputindo.
- Winardi. 2012. *Teori Organisasi Dan Pengorganisasian*. Yogyakarta: Rajawali Press
- Sufianto, Dadang. 2003. *Konsep Pemerintahan Dan Negara*. Bandung: Pustaka Setia.
- Thoha, Miftah. 2012. *Prilaku Organisasi, Konsep Dasar Dan Aplikasinya*. Surabaya: Buku Ngalam.
- Sumardi. 2013. *Pemuda Dalam Dinamika Politik Dan Kepemimpinan*. Cirebon: Mitra Pemuda.
- Fajar, Sirot. 2013. *Psikologi Pemuda*. Bandung: Mitra Pustaka Nurani
- Pramutoko, Bayu. 2008. *Kepemudaan Dan Keorganisasian*. Jakarta: Karta Sunda.
- [Sedarmayanti.](#) 2012. *Restruksisasi & Pemberayaan rganisasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Suharjo, dkk. 2014. *Organisasi Pemuda Lingkungan Di Indonesia Pasca-Orde Baru*. Yogyakarta: Gadj Mada University Press.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang
Kepemudaan.

Internet:

Wardhana. 2015. Membangun Generasi Smart Melalui Pendidikan
Karakter. Diambil dari: <http://kesbangpol.banyumaskab.go.id>. (20
Maret 2017)

Datokarama. 2015. *Revitalisasi Organisasi Kepemudaan*. Di ambil dari:
[www.slideshare.net/mobile/SHTdosenKita/pemberdayaan-
organisasi-kepemudaan](http://www.slideshare.net/mobile/SHTdosenKita/pemberdayaan-organisasi-kepemudaan). (20 Maret 2017)

Dzia. 2016. *Makalah Organisasi Pemuda*. Di ambil dari:
[http://dziauntaiancinta.blogspot.co.id/2016/03/makalah-
organisasi-pemuda.html](http://dziauntaiancinta.blogspot.co.id/2016/03/makalah-organisasi-pemuda.html). (20 Maret 2017)

Uny, Pustaka. 2013. *Pemberdayaan Pemuda*. Di ambil dari:
www.eprintis.uny.ac.id. (20 Maret 2017)

Muradi. 2012. *Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Generasi
Muda*. Diambil Dari:
[https://muradi.wordpress.com/2012/03/17/kebijakan-pemerintah-
dalam-pemberdayaan-generasi-muda/](https://muradi.wordpress.com/2012/03/17/kebijakan-pemerintah-dalam-pemberdayaan-generasi-muda/) (20 Maret 2017)

L
A
M
P
I
R
A
N